

EDISI 21

MAYANGKARA

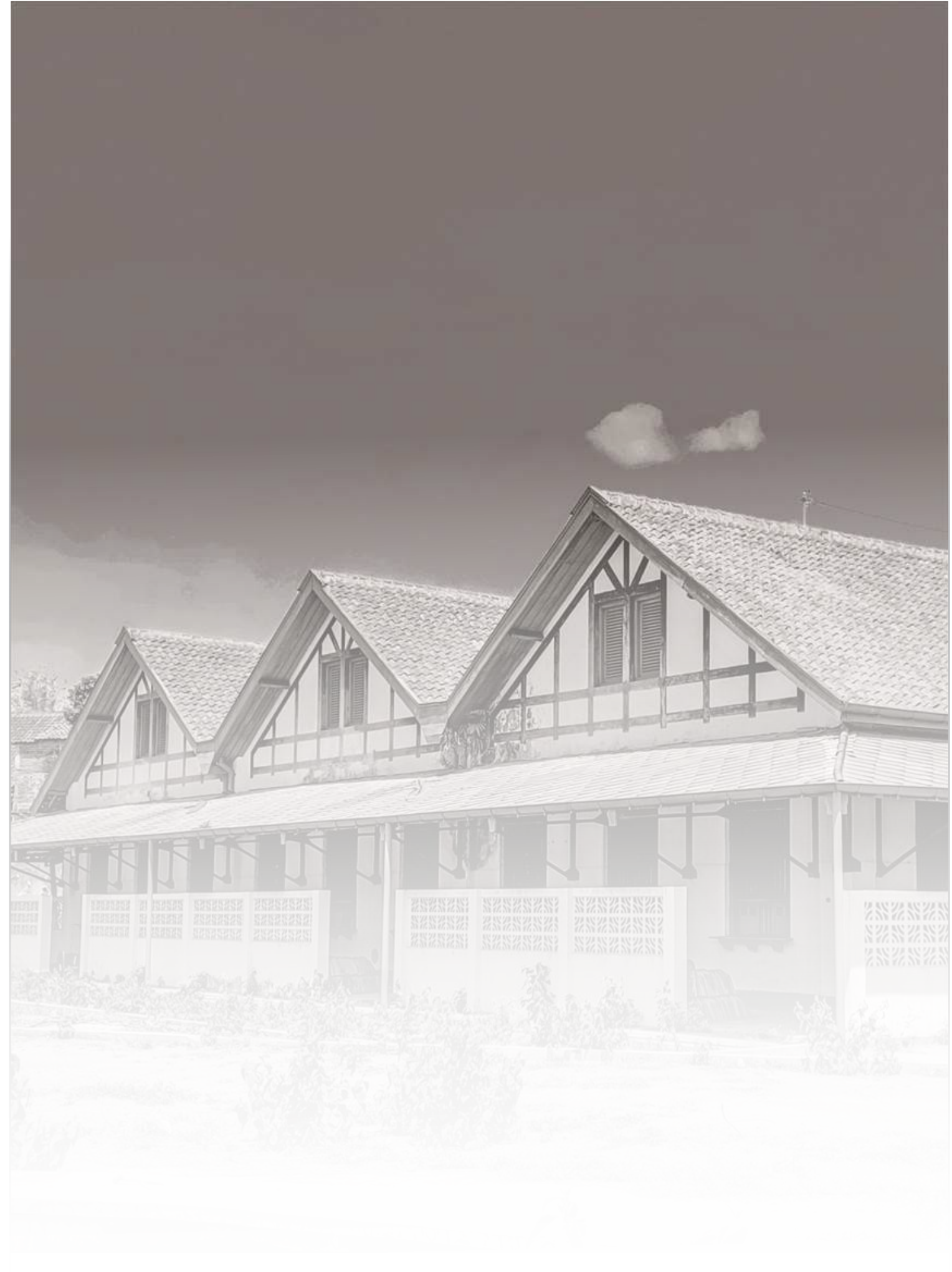
Buletin Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya



Jejak Arsitektur dan Transformasi Kantor Bersejarah



Sampul Depan



Atur Pambuka

Buletin Mayangkara lahir dari semangat untuk merawat ingatan kolektif bangsa melalui pelestarian warisan budaya dan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap bangunan, alat transportasi, maupun ruang sosial yang kita warisi adalah saksi perjalanan panjang peradaban. Di tengah derasnya arus modernisasi, warisan ini bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan fondasi yang memberi arah bagi langkah kita ke depan.

Melalui setiap edisi, Buletin ini menghadirkan narasi yang menghubungkan sejarah dengan kehidupan masa kini. Pembaca diajak menelusuri jejak waktu, memahami nilai-nilai yang terkandung dalam warisan budaya, serta menyaksikan berbagai upaya pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat. Dengan demikian, Buletin Mayangkara tidak hanya menjadi dokumentasi, tetapi juga ruang refleksi bersama tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara pelestarian dan pemanfaatan.

Kami percaya bahwa menjaga sejarah berarti menjaga jati diri bangsa. Warisan budaya yang tampak megah maupun yang tersembunyi di sudut kota dan desa adalah sumber ilmu pengetahuan sekaligus inspirasi bagi generasi mendatang. Setiap edisi diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta, kepedulian, dan tanggung jawab untuk merawat peninggalan sejarah agar tetap hidup dan relevan dalam kehidupan masyarakat.

Semoga Buletin Mayangkara senantiasa menjadi sahabat perjalanan waktu, yang mengingatkan kita bahwa kemajuan tidak harus menghapus jejak masa lalu, melainkan menjadikannya pijakan untuk melangkah lebih jauh. Selamat menikmati setiap halaman yang tersaji, dan mari bersama meneguhkan komitmen untuk menjaga warisan budaya sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan kita.

Selamat menikmati perjalanan waktu dalam setiap halamannya.

Salam Budaya

Redaktur



SUSUNAN REDAKSI

PENANGGUNG JAWAB:

Dian Lakshmi Pratiwi, S.S., M.A

REDAKTUR:

Dwi Agung Hernanto, S.S., M.M.

Isnani Umi Muslikhah, S.T., M.A., M. SocPolicy

EDITOR:

Anglir Bawono, S.S.

REPORTER:

RR. Annisa Surya Kemala, S.Ant.

JURU GAMBAR:

G.Ardi Saptomo Putranto, S.T.

DESAIN & LAYOUT:

Kurnia Dwi Antari Putri, S.Kel., M.Sc

Nuria Indah Kurnia Dewi, S. Sn., M. Sn.

Ruuddoni Yoga Darma Akbar, S.S.

Pradipta Agung Kumara, S.S.

KONTRIBUTOR:

Anggara Nandiwardhana, S.Ark

Bhaskara Ksatria, S.T.

Septian Dhanu Anggoro, S.Ark., M.B.A.

Adistya Rizki Nursanti, S.T, M.Arch

Dr. Ir. B. Sumardiyanto. M.Sc

Lengkong Sanggar Ginari, S.S., M. Hum

Septi Indrawati Kusumaningsih, S.S., M.A.

Luthfi Alwi Muttaqin, S.S., M. Sc.

SEKRETARIAT:

Anggraeni, S.T.

PENERBIT:

Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Daerah Istimewa Yogyakarta

RUBRIK

● **KORI:** rubrik pembuka berisi informasi mengenai sejarah dan penjelasan tema buletin edisi kali ini.

● **PENDHAPA:** tajuk utama dalam buletin.

● **PLATARAN:** rubrik ringan yang berisi perjalanan ataupun informasi situs warisan budaya di berbagai tempat, khususnya di DIY.

● **PRINGGITAN:** rubrik berisi kajian maupun penelitian yang membahas mengenai tema Buletin Mayangkara edisi kali ini.

● **EMPU:** rubrik wawancara interaktif dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam pelestarian warisan budaya dan cagar budaya.

● **PAWARTOS:** rubrik berisi berita-berita pelestarian warisan budaya dan cagar budaya.

● **PAGELARAN:** rubrik mengenai kegiatan masyarakat dalam upaya pelestarian terhadap warisan budaya dan cagar budaya .

● **SRAWUNG:** rubrik berisi serba-serbi mengenai warisan budaya dan cagar budaya.

● **TEBENG:** rubrik berisi pandangan masyarakat terhadap pelestarian warisan budaya dan cagar budaya di DIY.

● **KAWRUH:** rubrik berisi informasi-informasi warisan dan cagar budaya yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum.

● **MANCANAGARI:** rubrik berisi mengenai potensi warisan budaya dan cagar budaya di luar DIY.

Alamat Redaksi:
DINAS KEBUDAYAAN (Kundha kabudayan)
Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Cendana Nomor 11
No. Telp (0274) 562628
Email: heritagediy@gmail.com

UBARAMPE

» 8



8 MILITAIRE SOCIETEIT : MERAWAT MEMORI: TANTANGAN KONSERVASI BANGUNAN CAGAR BUDAYA AKTIF

Militaire Societeit merupakan bangunan Cagar Budaya yang menjadi bagian dari Benteng Vredeburg. Sejarah dari Gedung Militaire Societeit cukup panjang. Belum diketahui secara pasti kapan tahun pendirian bangunan ini, akan tetapi pembangunan gedung ini tidak jauh dari keberadaan Benteng Vredeburg dan perkembangan pemukiman masyarakat Belanda di Yogyakarta dari adanya undang-undang desentralisasi (*Decentralisatie Wet*) pada tahun 1903....

Oleh: Anggara Nandiwardhana

» 16



16 DARI KM 0 YOGYAKARTA HINGGA KE PELOSOK DESA: MENYUSURI KANTOR-KANTOR LAMA BERGAYA KOLONIAL DI DIY

Bangunan bergaya kolonial di Indonesia umumnya berkembang dalam tiga periode besar, mulai dari *Indische Empire* (abad ke-18–19), masa transisi (1890–1915), hingga arsitektur kolonial modern (1915–1940) (Hartono dan Handinoto, 2006). Pembagian serupa juga disampaikan oleh Helen Jessup yang menandai fase awal, kejayaan *Empire Style*, hingga masa pencarian identitas pada awal abad ke-20....

Oleh: Bhaskara Ksatria

» 22



22 KONTINUITAS DAN TRANSFORMASI CAGAR BUDAYA KEPATIHAN YOGYAKARTA

Kepatihan Yogyakarta merupakan salah satu contoh paling representatif dari keberlanjutan fungsi ruang dalam sejarah perkotaan di Indonesia. Berbeda dengan banyak bangunan bersejarah yang mengalami alih fungsi menjadi museum atau objek wisata, Kepatihan justru mempertahankan fungsi utamanya sebagai pusat administrasi pemerintahan sejak pertengahan abad ke-18 hingga saat ini. ...

Oleh: Septian Dhanu Anggoro

» 30



30 SIMFONI RUANG DAN SEJARAH: MERAWAT INGATAN KOTA MENELUSURI LABKES DIY DAN BAPEL JAMKESOS

Di tengah Kota Yogyakarta yang terus bergerak secara dinamis, terdapat ruang-ruang kerja yang diam-diam menyimpan lapisan sejarah (*historical layer*) yang panjang. Dua di antaranya adalah Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi (Labkes) DIY berada di kawasan Mantrijeron yang menempati eks nDalem Ngadinengaran serta Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkesos) yang berada di wilayah Jetis. ...

Oleh: Aditya Rizki Nursanti

36 TEBENG: ORNAMEN PERLINDUNGAN DALAM HARMONI ARSITEKTUR JAWA

Menurut Magnis Suseno, keselamatan dalam pandangan hidup orang Jawa dicapai dengan menjaga keselarasan hubungan manusia dengan tiga unsur kehidupan: alam, sesama manusia, dan Tuhan. Terhadap alam, orang Jawa mengenal prinsip *Hamemayu Hayuning Bawana*, yaitu memelihara dan bahkan memperindah alam semesta....

Oleh: B. Sumardiyanto

43 MENILIK KANTOR PEGADAIAN TEMPEL: SAKSI BISU PEREKONOMIAN RAKYAT

Sebagaimana masyarakat saat ini, masyarakat masa lalu juga telah mengenal praktik gadai, yakni menukar barang berharga dengan sejumlah uang dalam waktu singkat. Apabila barang berharga yang digadaikan gagal ditebus, maka barang tersebut akan dilelang....

Oleh: Lengkong Sanggar Ginaris

» 36



48 JEJAK BEKAS KANTOR LURAH : MERAWAT MEMORI PEMERINTAHAN DESA DI YOGYAKARTA

Desa merupakan bentuk organisasi kekuasaan yang telah hadir jauh sebelum lahirnya kerajaan maupun negara modern. Desa tumbuh dan berkembang dalam kehidupan tradisional, dengan tata pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kebiasaan serta ketentuan adat yang berlaku secara lokal.

Oleh: Septi Indrawati Kusumaningsih

54 MERAWAT KANTOR PEMERINTAHAN TUA: BELAJAR DARI BERBAGAI NEGARA

Di tengah perkembangan sosial dan teknologi yang pesat, bangunan bersejarah yang telah berusia puluhan bahkan ratusan tahun menghadapi ancaman degradasi, baik secara fisik maupun pada nilai penting yang dikandungnya....

Oleh: Luthfi Alwi Muttaqin

» 43





Militaire Societeit
pasca pemugaran
2023. sumber:
dokumentasi:
penulis

MILITAIRE SOCIETEIT

Merawat Memori: Tantangan Konservasi Bangunan Cagar Budaya Aktif

Oleh: Anggara Nandiwardhana

Jejak Sejarah dan Perubahan Fungsi

Militaire Societeit merupakan bangunan Cagar Budaya yang menjadi bagian dari Benteng Vredeburg. Sejarah dari Gedung Militaire Societeit cukup panjang. Belum diketahui secara pasti kapan tahun pendirian bangunan ini, akan tetapi pembangunan gedung ini tidak jauh dari keberadaan Benteng Vredeburg dan perkembangan pemukiman masyarakat Belanda di Yogyakarta dari adanya undang-undang desentralisasi (*Decentralisatie Wet*) pada tahun 1903. Kebijakan ini mendorong perluasan pemukiman Belanda dari kawasan Loji Kecil meluas ke jalan Setyodiningratan (*Kampenmensstraat*) kemudian ke Jalan Bintaran, Jetis, dan Kotabaru. Pada masa itu, bangunan societeit berfungsi sebagai sarana hiburan dan pertemuan bagi masyarakat Eropa.

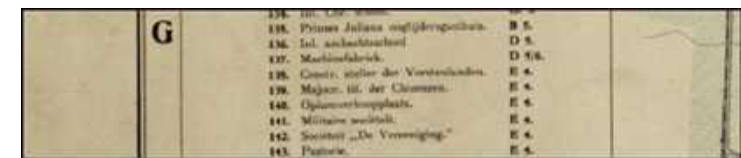
Fungsi bangunan ini kemudian berubah seiring dinamika sejarah. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, gedung ini dikuasai oleh *Kenpeitai* (Jep:憲兵隊) atau polisi militer Jepang di bawah Komandan Nakamiwa dan Wakil Komandan Kabayasi. Tentara Jepang memanfaatkan bangunan ini sebagai semacam balai pertemuan bagi para tentara dan tempat latihan samurai dengan memakai tongkat pada siang hari.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, bangunan ini digunakan sebagai Markas Besar Polisi Tentara (MBPT). Salah satu tokoh yang pernah bermarkas di sini adalah Kapten Tjokropranoto, pengawal pribadi Jenderal Sudirman yang kemudian menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta (1977–1982). Pada masa Gerakan 30 September, gedung ini tetap difungsikan sebagai instansi militer di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan hingga tahun 1977.

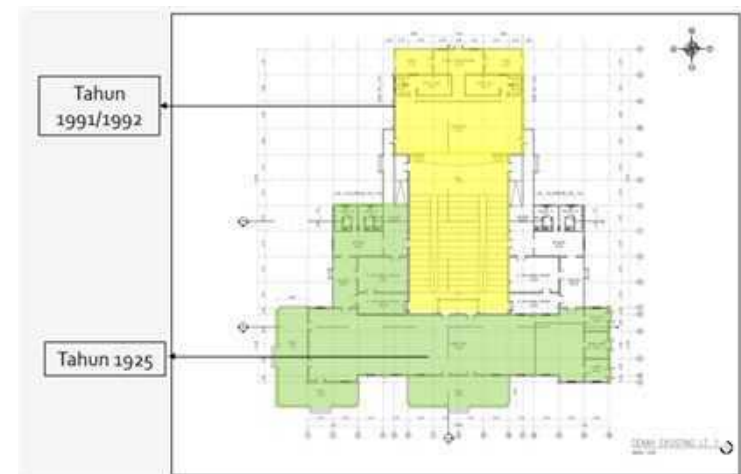
Memasuki dekade 1980-an, fungsi bangunan mulai bergeser. Pada tahun 1982 dilakukan rehabilitasi dan revitalisasi untuk mendukung kegiatan pendidikan dan kebudayaan. Upaya pelestarian berlanjut melalui



Militaire Societeit sebelum dipugar pada tahun 1991
sumber : Arsip Foto Renovasi Gedung Militaire Societeit,
BPCB Yogyakarta



Posisi Militaire Societeit pada Jogjakarta en Omstreken 1925
terlihat pada nomor 141



restorasi pada tahun 1991 dan renovasi pada 1992 dengan pendekatan arkeologis. Penambahan fasilitas perpustakaan dilakukan pada sisi barat bangunan pada tahun 2007, disusul rehabilitasi pada 2014 yang difokuskan pada perbaikan atap dan panggung.



Kondisi dinding dan panel pada ruang pertunjukan pada saat dibongkar.
sumber : Dokumentasi Penulis



Perubahan Fisik dan Upaya Pemugaran

Gedung Militaire Societeit terdiri dari bangunan utama yang terhubung dengan gedung pertunjukan, serta dilengkapi fasilitas pendukung seperti panggung terbuka kecil, perpustakaan, dan area parkir. Bangunan ini berada di kompleks Taman Budaya Yogyakarta, tepatnya di sisi timur.

Gedung pertunjukan merupakan tambahan yang dibangun pada pemugaran tahun 1991/1992 oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya untuk memenuhi kebutuhan ruang pertunjukan indoor. Pada tahap ini, bagian depan bangunan juga diperbaiki secara menyeluruh dengan penambahan beberapa komponen baru. Material plesteran bangunan utama yang semula menggunakan acian bligon kemudian diganti dengan semen (*Portland cement*) guna meningkatkan kekuatan struktur.

Sebagai bangunan cagar budaya, Militaire Societeit telah ditetapkan melalui SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 210/KEP/2010, SK Wali Kota Yogyakarta No. 798/KEP/2009, serta Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.89/PW.007/MKP/2011.

Pemugaran 2023: Dinamika dan Tantangan di Lapangan

Pemugaran pada tahun 2023 menjadi salah satu tahap penting dalam upaya pelestarian Militaire Societeit. Pekerjaan dilakukan secara menyeluruh, terutama pada bagian gedung pertunjukan yang mengalami penurunan kondisi fisik yang ditandai dengan cat yang mengelupas pada dinding, lisplang, *balustrade* PC, dan *gording*. Beberapa elemen kayu seperti *wenfir*, usuk plafon, kusen pintu dan jendela juga mengalami pelapukan, sementara pada area selasar, kerusakan dipicu oleh kelembaban.

Pemugaran yang dilakukan meliputi perbaikan atap, dinding, sistem kelistrikan, instalasi alarm APAR, serta penambahan sistem pendingin ruangan. Pada bangunan lama, dilakukan pengecatan ulang, penggantian lampu hias, serta perbaikan dan penggantian kusen yang rusak. Pemugaran ini berlangsung selama 120 hari kalender, dimulai pada 18 Agustus 2023.

Dalam pelaksanaannya, sejumlah kendala muncul yang tidak terdeteksi pada tahap perencanaan. Serangan rayap pada

dinding dan panel hias baru ditemukan setelah elemen penutup seperti akustik dan bangku dibongkar. Selain itu, kerusakan kayu jati, khususnya pada kusen, jauh lebih parah dari perkiraan, sementara keterbatasan volume dan biaya material menyebabkan sebagian pekerjaan kayu tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana. Kondisi ini mendorong penyesuaian pekerjaan dengan mempertimbangkan efektivitas dan keberlanjutan.

Berbagai metode diterapkan dalam pemugaran ini, meliputi rekonstruksi, rehabilitasi, konsolidasi, dan konservasi. Rekonstruksi dilakukan antara lain dengan mengembalikan nama bangunan pada fasad berdasarkan dokumentasi lama. Rehabilitasi difokuskan pada pemulihan fungsi melalui perbaikan atap dan komponen bangunan. Konsolidasi mencakup perkuatan struktur, terutama pada rangka dinding akustik dan rangka atap gedung pertunjukan. Sementara itu, konservasi dilakukan pada kusen kayu dengan penanganan pelapukan menggunakan resin, pelapis kedap air, dan penutup semen.

Pada ruang pertunjukan, beberapa rencana juga mengalami perubahan. Lampu kristal yang semula akan dibersihkan akhirnya dilepas karena kondisi yang rapuh dan berisiko. Serangan rayap pada struktur kayu juga jauh lebih luas dari perkiraan, sehingga diperlukan penggantian rangka kayu hingga sekitar 500 m², termasuk penggunaan kayu bengkirai sebagai rangka baru untuk sistem akustiknya.

Selain perbaikan struktur, pemugaran juga mencakup peningkatan fasilitas, seperti pembersihan dan perbaikan atap, pemasangan AC, penggantian karpet, penambahan pencahayaan ruang, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti sanitair, ruang laktasi, dan toilet.



Kondisi kusen jendela setelah dibongkar
sumber : Dokumentasi Penulis



Lampu gedung pertunjukan sebelum dan sesudah pemugaran.
sumber : Dokumentasi Penulis

Ruang Sosial yang Terus Hidup

Penamaan societeit sendiri merujuk pada fungsi bangunan sebagai ruang bersosialisasi atau kegiatan sosial komunal. Sejak awal berdirinya, Militaire Societeit memang dimanfaatkan sebagai gedung pertunjukan dan ruang rekreasi bagi keluarga militer Belanda yang tinggal di kawasan Loji, baik Loji Kecil maupun Loji Besar.

Pada akhir pekan maupun hari-hari penting, seperti peringatan kelahiran Ratu Wilhelmina, gedung ini menjadi tempat berbagai pertunjukan, mulai dari sulap, sandiwara atau tonil seperti Sam Pek Eng Thay (**China**: 山伯英台 film pada tahun 1931 yang rilis di Hindia Belanda), drama Hamlet (cerita karangan William Shakespeare mengenai pangeran Denmark), dansa, dan pertunjukan musik atau muziekenten keluarga militer Belanda dengan konduktor Van Der Wallen. Selain itu, bangunan ini juga digunakan untuk kegiatan latihan anggar.

Kini, fungsi tersebut terus berlanjut dalam bentuk yang berbeda. Militaire Societeit



menjadi ruang pertunjukan yang terbuka untuk umum, dengan kapasitas sekitar 300 penonton dan panggung berukuran 10 x 8 meter. Berbagai kegiatan seperti pertunjukan seni, konser musik, dan acara budaya rutin diselenggarakan di tempat ini. Masyarakat dapat memantau event yang diselenggarakan di Gedung ini melalui laman Taman Budaya Yogyakarta tby.jogjaprov.go.id.

Pemanfaatan aktif bangunan cagar budaya juga menuntut perhatian terhadap aspek perawatan. Hasil pemugaran menunjukkan bahwa bangunan yang terus digunakan memerlukan pemeliharaan berkala, seperti pengendalian hama, pengecekan elemen kayu, serta perawatan instalasi kelistrikan untuk mengantisipasi kerusakan maupun risiko kebakaran. Seiring dengan itu, pengembangan fasilitas modern perlu dilakukan secara bijak. Penambahan sistem pencahayaan, tata suara,

maupun fasilitas pendukung lainnya sebaiknya melibatkan ahli pertunjukan agar tetap selaras dengan karakter bangunan. Upaya lain seperti penyediaan ruang interpretasi, misalnya mini museum yang menampilkan sejarah dan proses pemugaran, juga dapat memperkuat nilai edukasi bagi masyarakat.

Melalui keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian, Militaire Societeit tidak hanya bertahan sebagai bangunan bersejarah, tetapi juga terus hidup sebagai ruang publik yang relevan bagi masyarakat masa kini.

*Militaire Societeit sebelum pemugaran 2023
sumber : Dokumentasi Penulis*

Sumber Bacaan:

Cakramurti, Gusti Reynaldi, "Seminar Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI) 1, Jejak Societeit Concordia di Bandung", 2017.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor PM.89/PW.007/MKP/2011 tentang Penetapan Cagar Budaya Di Provinsi D.I.Yogyakarta, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta, Data Penetapan Benda Cagar Budaya/ Situs, Gedung Societeit Militaire, 2010.



*Militaire Societeit pasca pemugaran 2023.
Sumber : dokumentasi: penulis*

Nandiwardhana, Anggara, dan Aloysius Santoso. Laporan Pendamping Pelaksanaan Pemugaran Rehabilitasi Bangunan Militaire Societeit. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta. 2023

"Mengenal Keunikan Bangunan Societeit Mangkoenegaran" <https://mpn.komdigi.go.id/index.php/mengenal-keunikan-bangunan-societeit-mangkoenegaran>. Diakses pada tanggal 16 April 2026.



Jogjakarta Ukulele Society (JUS)
memainkan ukulele di lobby Bangunan
Kuno Militaire Societeit.
sumber : Youtube.com



Drama musikal Muara pada 21 April 2025
sumber: Youtube.com



Anggara Nandiwardhana, S.Ark Merupakan sarjana Arkeologi Universitas Gadjah Mada, merupakan Tim Ahli Cagar Budaya dan Tenaga Ahli Pelestari Cagar Budaya yang berkegiatan di bidang Pelestarian Cagar Budaya dan terlibat pada beberapa kegiatan pemugaran, penata pameran temporer museum dan beberapa kegiatan kajian Studi Teknis dan Studi Kelayakan.



Gedung Agung
Sumber : foto dari
Dinas Kebudayaan
(Kundha Kabudayan)
DIY tahun 2014

Dari KM 0 Yogyakarta Hingga ke Pelosok Desa: Menyusuri Kantor-Kantor Lama Bergaya Kolonial di DIY

Oleh: Bhaskara Ksatria

Bangunan bergaya kolonial di Indonesia umumnya berkembang dalam tiga periode besar, mulai dari *Indische Empire* (abad ke-18–19), masa transisi (1890–1915), hingga arsitektur kolonial modern (1915–1940) (Hartono dan Handinoto, 2006). Pembagian serupa juga disampaikan oleh Helen Jessup yang menandai fase awal, kejayaan *Empire Style*, hingga masa pencarian identitas pada awal abad ke-20. Sementara itu, Thomas Nix melihatnya sebagai pergeseran dari periode tertutup menuju terbuka hingga modern.

Ciri-ciri dari arsitektur kolonial antara lain adalah

1. Denah dan tampilan bangunan umumnya simetris, dengan ruang utama di tengah. Pada periode modern, bentuk ini menjadi lebih variatif dan tidak selalu simetris,
2. Memiliki teras luas sebagai respon terhadap iklim, yang kemudian berkembang menjadi tritisan atau elemen peneduh lainnya,
3. Menggunakan atap pelana, limasan, atau perisai, dengan penutup awal berupa genteng tanah liat yang kemudian berkembang menggunakan beton bertulang dan material lain seperti sirap.
4. Ornamen awal berupa tiang bergaya Yunan, lalu berkembang dengan elemen seperti *gevel* (dinding depan terutama bagian atas), menara dan konstruksi tambahan pada atap untuk ventilasi, serta cenderung disederhanakan pada periode modern.

Bangunan bergaya arsitektur kolonial cukup banyak ditemui di Kota Yogyakarta, meskipun tidak sebanyak di kota-kota pelabuhan. Di luar kota, bangunan serupa tersebar di berbagai wilayah DIY, sebagian berkaitan dengan sekitar 19 pabrik gula, serta jaringan kereta api, kantor pemerintahan, pegadaian, dan instansi kehutanan maupun pertanian. Bangunan-bangunan ini dahulu memiliki beragam fungsi, mulai dari pabrik, kantor, rumah dinas, hingga fasilitas publik. Kini, sebagian masih digunakan seperti semula, sementara lainnya telah beralih fungsi.

Tulisan ini berfokus pada bangunan yang saat ini atau pernah berfungsi sebagai kantor dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Perlu dicatat, tidak semua bangunan bergaya kolonial dibangun pada masa kolonial; sebagian merupakan bangunan pascakemerdekaan yang mengadopsi gaya tersebut.

Di kawasan Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta terdapat sejumlah bangunan yang berfungsi sebagai kantor, seperti Kantor Pos Besar

Yogyakarta, Kantor Bank BNI, Gedung Agung, Korem 072 Pamungkas, Polresta Yogyakarta, dan Benteng Vredeburg. Gedung Agung sendiri merupakan contoh arsitektur *Indische Empire* yang dibangun pada 1824 dan dibangun kembali pasca gempa 1867, dengan ciri denah simetris, pilar besar, serta bukaan lebar yang mendukung sirkulasi udara.

Jejak arsitektur kolonial juga terlihat di sepanjang Sumbu Filosofi Yogyakarta, seperti Kantor Harian Kedaulatan Rakyat serta bangunan eks Manulife yang berada di Jl. Margo Utomo. Sementara di Jl. Malioboro bagian selatan terdapat *Hollandse Trapgevelhuis* bekas *Salon en Coiffeur* yang kini menjadi kantor Bank BPD DIY Malioboro, Perpustakaan DIY (Jogja Library Center), dan Kantor DPRD DIY. Di utara Tugu Pal Putih, kawasan Jetis, terdapat Kantor GKPN PKPRI yang kini menjadi kantor Harian Jogja, serta bangunan yang kini digunakan sebagai kantor Bapel Jamkesos Dinas Kesehatan DIY.

Selain di kawasan Sumbu Filosofi DIY, bangunan bergaya kolonial yang kini berfungsi sebagai kantor juga dapat ditemui di Kotabaru dan sekitar Puro Pakualaman. Di Kotabaru, beberapa di antaranya adalah Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Museum TNI AD, Museum Sandi, Gedung RRI, dan Gedung PT Asuransi Jiwasraya. Bangunan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dulunya merupakan rumah tinggal Letjen Urip Sumoharjo sekaligus titik akhir rute gerilya Jenderal Sudirman. Museum TNI AD memiliki riwayat panjang, dari rumah pejabat perkebunan Belanda, markas tentara Jepang, hingga Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat, sebelum akhirnya menjadi museum. Sementara itu, Museum Sandi pernah digunakan sebagai kantor Kementerian Luar Negeri saat Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia.

Sedangkan di sekitar Puro Pakualaman terdapat Museum Sasmita Loka Panglima Besar Jenderal Sudirman, Museum Biologi, dan Kantor Oditurat Militer II-10 Yogyakarta. Museum



*Puskesmas Mlati II, dilihat dari timur, diambil pada sekitar tahun 2018.
sumber : Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman.*

Sasmita Loka dulunya merupakan kediaman resmi Jenderal Sudirman, kemudian beralih fungsi menjadi markas militer dan Museum TNI AD sebelum dipindahkan ke lokasi saat ini. Selain itu, terdapat pula bangunan yang berkaitan dengan perkeretaapian, seperti Stasiun Yogyakarta (Stasiun Tugu), Stasiun Lempuyangan, dan Balai Yasa Yogyakarta di sebelah timurnya. Di sekitar kompleks tersebut masih dapat dijumpai fasilitas penunjang berupa rumah-rumah dinas bergaya kolonial.

Wilayah Bantul juga menyimpan jejak bangunan kolonial yang berkaitan dengan industri gula. Sekitar 4,5 km barat daya Alun-Alun Paseban, terdapat bekas rumah administrasi Pabrik Gula Gesikan yang kini menjadi Kantor Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak. Bangunan lain yang masih tersisa antara lain Rumah Sakit Santa Elisabeth, SD Kanisius Ganjuran, dan SMP Kanisius Bambanglipuro sebagai fasilitas pendukung Pabrik Gula Gondanglipuro. Selain itu, jejak arsitektur kolonial juga tampak pada Stasiun Palbapang, Stasiun Bantul, dan Stasiun Winongo.



*Kantor Kalurahan Wijirejo.
Sumber : Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul tahun 2022.*



*Bangunan Kepanjen Berbah.
Sumber : Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY tahun 2016.*



*Puskesmas Mlati II tahun 1920-an. Saat itu menjadi Hulphospitaal Tjebongan.
sumber : data dari Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman,
yang mengambil sumber foto dari Het Ziekenhuis Petronella.*

Wilayah Sleman menyimpan sejumlah bangunan kolonial yang berkaitan dengan industri gula. Salah satunya adalah bangunan lama yang kini digunakan sebagai SMPN 1 Sleman, yang dahulu berfungsi sebagai kantor sekaligus rumah administrasi Pabrik Gula Medari. Jejak serupa juga terlihat pada bangunan lama Puskesmas Mlati II, yang sebelumnya merupakan rumah sakit pembantu bagi Pabrik Gula Cebongan. Di bagian timur Sleman, SMPN 1 Berbah dan Kantor Polsek Berbah berasal dari rumah dinas yang terkait dengan Pabrik Gula Tanjung Tirta.

Selain itu, terdapat pula bangunan kantor bergaya kolonial yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya, seperti Bangunan Kepanjen di kompleks Kantor Kapanewon Berbah, Bangunan Lama Kantor Kapanewon Kalasan, serta Kantor Kapanewon Tempel. Kantor Pegadaian Tempel juga menjadi contoh menarik, dengan ukuran bangunan yang relatif besar dibandingkan

kantor pegadaian lainnya di DIY dan terletak di jalur utama dari arah Magelang, tidak jauh dari Jembatan Krasak.

Bangunan Kepanjen memiliki denah simetris dengan teras di bagian depan dan belakang. Di bagian belakang terdapat bangunan penunjang yang dahulu digunakan untuk fungsi domestik seperti gudang, dapur, dan kamar mandi. Seiring kebutuhan ruang, bagian depan bangunan utama dilengkapi pendapa sebagai ruang berkumpul. Kondisinya kini telah lebih baik setelah dilakukan pemugaran oleh Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman pada tahun 2018.

Wilayah Gunungkidul relatif memiliki lebih sedikit bangunan kolonial yang ditetapkan sebagai cagar budaya. Beberapa di antaranya berupa bangunan sekolah dasar negeri di Semanu, Semin, Ngawen, dan Ponjong, serta rumah dinas sinder hutan di kawasan Karangmojo, Paliyan, dan Playen. Untuk bangunan yang berfungsi



*Bale Agung.
Sumber : foto dari Dinas
Kebudayaan
(Kundha Kabudayan) DIY
tahun 2016 dan diolah
dengan Gemini AI.*



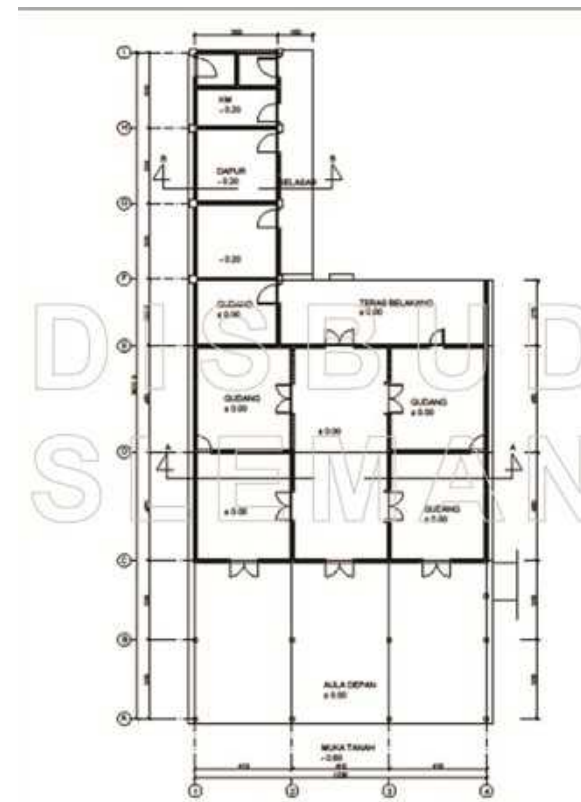
*Eks Kecamatan Nanggulan.
Sumber : foto dari Dinas Kebudayaan (Kundha
Kabudayan) DIY tahun 2023.*

sebagai kantor, jejak arsitektur kolonial dapat ditemui pada Kantor Pegadaian Wonosari.

Kulon Progo memiliki bangunan kolonial yang relatif lebih banyak, terutama di kawasan pusat kota, dibandingkan tiga kabupaten lainnya di DIY. Sebagian besar bangunan tersebut dibangun sebelum dan sekitar masa kemerdekaan. Kawasan di sekitar Alun-Alun Wates, khususnya di utara jalur kereta api, telah ditetapkan sebagai Situs Pusat Pemerintahan Kota Wates Lama. Bersama dengan Situs Permukiman Kota Wates Lama di sisi selatan, kawasan ini kemudian ditetapkan sebagai Kawasan Kota Wates Lama.

Salah satu bangunan penting di kawasan ini adalah Bale Agung yang berada di kompleks Pemda Kulon Progo, di sisi timur Alun-Alun Wates. Dibangun pada 1918, bangunan ini menurut sumber lisan pernah menjadi lokasi penandatanganan penyatuan Kabupaten Adikarto dan Kulon Progo pada tahun 1951. Di sekitar Alun-Alun Wates juga terdapat sejumlah bangunan lain, seperti gedung Media Center, eks Gedung Panitia Pengawas Pemilu yang kini menjadi Gedung PKK, Kantor Kepolisian Sektor Wates, serta deretan rumah dinas kepolisian. Selain itu, di sisi timur kawasan masih terdapat bangunan gereja dan sekolah.

Di tingkat kapanewon, sejumlah kantor di Kulon Progo masih mempertahankan bangunan lama bergaya kolonial, antara lain di Lendah, Wates, Galur, Panjatan, Temon, dan Nanggulan. Pada beberapa lokasi, bangunan induk bergaya kolonial dipadukan dengan pendapa bergaya arsitektur Jawa di bagian depan. Salah satu contohnya adalah bekas Kantor Kapanewon Nanggulan yang kini menjadi bagian dari Puskesmas Nanggulan, meskipun pendapa di bagian depannya sudah tidak lagi terlihat.



*Denah Kepanjen Berbah.
Sumber : data dari Dinas Kebudayaan (Kundha
Kabudayan)
Kabupaten Sleman tahun 2017.*

Sumber bacaan

- Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul. *Surat Keputusan Penetapan Cagar Budaya*. Bantul, 2016-2024. Dokumen.
- Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Gunungkidul. *Surat Keputusan Penetapan Cagar Budaya*. Wonosari, Gunungkidul, 2016-2024. Dokumen.
- Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Kulon Progo. *Surat Keputusan Penetapan Cagar Budaya*. Wates, Kulon Progo, 2016-2024. Dokumen.
- Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman. *Surat Keputusan Penetapan Cagar Budaya*. Sleman, 2016-2024. Dokumen.
- Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta. *Surat Keputusan Penetapan Cagar Budaya*. Yogyakarta, 2016-2024. Dokumen.
- Hartono, Samuel dan Handinoto. ““Arsitektur Transisi” di Nusantara dari Akhir Abad 19 ke Awal Abad 20 (Studi Kasus Komplek Bangunan Militer di Jawa pada Peralihan Abad 19 ke 20.” *Dimensi Teknik Arsitektur Vol 34, No. 2* (2006): 81-92.



Bhaskara Ksatria, Pamong Budaya di Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY, yang terpaksa belajar menulis karena tuntutan pekerjaan. Penulis juga anggota Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo.



nDalem Kepatihan

sumber: Septian Dhanu Anggoro, tahun 2026

Kontinuitas dan Transformasi Cagar Budaya Kepatihan Yogyakarta

Oleh: Septian Dhanu Anggoro

Kepatihan Yogyakarta merupakan salah satu contoh paling representatif dari keberlanjutan fungsi ruang dalam sejarah perkotaan di Indonesia. Berbeda dengan banyak bangunan bersejarah yang mengalami alih fungsi menjadi museum atau objek wisata, Kepatihan justru mempertahankan fungsi utamanya sebagai pusat administrasi pemerintahan sejak pertengahan abad ke-18 hingga saat ini. Keberlanjutan ini menjadikan Kepatihan sebagai bentuk *living heritage*, yakni warisan budaya yang tetap hidup dan berfungsi dalam praktik

sosial kontemporer (Smith, 2006, 83). Dalam konteks ini, nilai penting Kepatihan tidak hanya terletak pada aspek fisik bangunan, tetapi juga pada kesinambungan fungsi, makna, dan praktik kelembagaan yang berlangsung di dalamnya.

Secara spasial, Kepatihan merupakan bagian integral dari sistem tata kota tradisional Yogyakarta yang tersusun dalam sumbu filosofis utara-selatan, yang menghubungkan Panggung Krapyak, Kraton Yogyakarta, dan Tugu. Keberadaan Kepatihan di luar kompleks keraton mencerminkan pembagian yang tegas antara pusat kekuasaan simbolik (keraton) dan pusat administrasi pemerintahan (kepatihan) (Nas, 2007, 56). Pola ini menunjukkan bahwa sejak awal, tata kota Yogyakarta telah dirancang dengan mempertimbangkan diferensiasi fungsi ruang secara konseptual dan kosmologis.

Sejarah Perkembangan dan Transformasi Kelembagaan

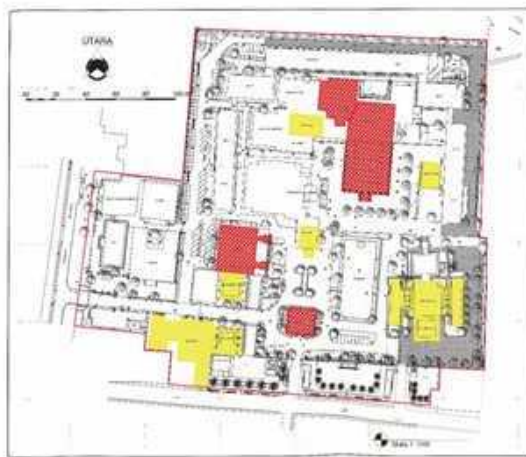
Kepatihan didirikan bersamaan dengan berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada tahun 1755, pasca-Perjanjian Giyanti. Kompleks ini berfungsi sebagai kediaman sekaligus kantor Papatih Dalem, pejabat tinggi yang menempati posisi kedua setelah Sultan dalam struktur pemerintahan. Papatih Dalem, yang umumnya bergelar Danureja, memiliki peran strategis sebagai pengelola administrasi internal kerajaan sekaligus penghubung antara Sultan dengan pemerintah kolonial Belanda.

Sepanjang masa kolonial, struktur kepatihan tetap dipertahankan, meskipun mengalami penyesuaian dalam praktik administrasi. Kepatihan menjadi simpul penting dalam sistem pemerintahan dualistik antara kekuasaan tradisional dan kolonial. Dengan demikian, sejak awal keberadaannya, Kepatihan telah berfungsi sebagai ruang negosiasi antara tradisi lokal dan sistem pemerintahan modern.

Transformasi signifikan terjadi pada masa pendudukan Jepang (1942–1945), ketika Sultan Hamengku Buwono IX mulai melakukan



Foto Udara yang Menggambarkan Situs Cagar Budaya Kompleks Kepatihan
sumber: Citra satelit Google Earth tanggal 5/8/2019 dalam SK GUB DIY no. 57 Tahun 2020



Gambar Tampak Atas Kompleks Kepatihan
Sumber: Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda DIY dengan modifikasi Dinas Kebudayaan DIY, tahun 2019



Foto Udara nDalem Kepatihan
sumber: Dinas Kebudayaan DIY, tahun 2019

reformasi birokrasi secara menyeluruh. Dalam periode ini, Sultan secara langsung mengambil alih fungsi administratif yang sebelumnya dijalankan oleh Papatih Dalem. Ia membentuk struktur birokrasi modern melalui lembaga-lembaga yang dikenal sebagai *Paniradya*, seperti Sanapitra (kesekretariatan), Wiyataprja (pendidikan), dan Ayahan Umum (pemerintahan umum) (Dinas Kebudayaan DIY, 2020).

Puncak perubahan terjadi pada 1 Agustus 1945, ketika jabatan Papatih Dalem secara resmi dihapus setelah pemberhentian Danureja VIII. Keputusan ini menandai berakhirnya sistem birokrasi tradisional berbasis kepatihan dan sekaligus membuka jalan bagi integrasi Yogyakarta ke dalam sistem pemerintahan nasional. Tidak lama kemudian, pada 13 Juni 1946, kompleks Kepatihan difungsikan sebagai Kantor Penerangan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saat itu berperan sebagai ibu kota sementara Republik Indonesia. Sejak saat itu



Gedhong Wilis
sumber: Dokumentasi Penulis, tahun 2026



Foto Udara Masjid Sulthoni
sumber: Dinas Kebudayaan DIY, tahun 2019

hingga kini, Kepatihan terus berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan daerah (Dinas Kebudayaan DIY, 2020).

Arsitektur dan Tata Ruang

Secara arsitektural, Kepatihan mengadopsi tipologi rumah tinggal bangsawan Jawa dengan skala dan kompleksitas yang lebih besar. Bangunan utama, yang dikenal sebagai *ndalem* Kepatihan, terdiri atas susunan ruang berlapis: *pendhapa*, *pringgitan*, *ndalem ageng*, dan *gadri*. *Pendhapa* sebagai ruang publik utama berbentuk *joglo lawakan* dengan empat *saka guru* sebagai struktur inti, mencerminkan hierarki ruang yang terbuka sekaligus formal.

Di bagian dalam, *ndalem ageng* memuat ruang-ruang yang lebih privat dan sakral, termasuk *senhong tengah* yang dilengkapi dengan *krobongan* atau *pasren*. Keberadaan elemen ini menunjukkan bahwa Kepatihan tidak hanya berfungsi sebagai pusat administratif, tetapi juga sebagai ruang yang memiliki dimensi simbolik

dan spiritual. Hal ini sejalan dengan konsep kosmologi Jawa yang memadukan aspek duniawi dan transendental dalam satu kesatuan ruang.

Kompleks ini juga dilengkapi dengan bangunan pendukung seperti Gedhong Wilis, Gedhong Pacar, Bale Mangu, serta Masjid Sulthoni yang didirikan pada tahun 1756. Masjid ini memiliki ciri khas arsitektur tajug dengan detail ornamen yang menunjukkan pengaruh estetika Jawa-Islam. Sementara itu, Bale Mangu yang terletak di bagian depan kompleks pada awalnya berfungsi sebagai ruang pengadilan kepatihan, khususnya dalam perkara agraria, serta sebagai tempat transit bagi abdi dalem sebelum mengikuti upacara di keraton.

Seiring waktu, beberapa perubahan fisik terjadi sebagai bagian dari upaya adaptasi terhadap kebutuhan fungsi modern. Renovasi pada tahun 2012, misalnya, mencakup perbaikan struktur bangunan, penggantian lantai *tegél*, serta penambahan sistem pencahayaan dan kelistrikan. Meskipun demikian, intervensi tersebut dilakukan dengan tetap mempertahankan karakter visual dan struktur utama bangunan, sesuai dengan prinsip pelestarian cagar budaya (Republika Online, 2012).

Kontinuitas Fungsi dan Adaptasi Modern

Keunikan utama Kepatihan terletak pada kemampuannya mempertahankan fungsi administratif secara berkelanjutan, meskipun terjadi perubahan besar dalam sistem politik dan pemerintahan. Dalam perspektif pelestarian, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk *adaptive continuity*, yaitu keberlanjutan fungsi yang disertai dengan penyesuaian terhadap konteks zaman tanpa menghilangkan identitas dasar bangunan.

Berbeda dengan banyak bangunan bersejarah lain yang mengalami alih fungsi menjadi ruang representasi budaya, Kepatihan tetap menjadi ruang kerja aktif bagi birokrasi pemerintahan. Ruang-ruang tradisional seperti *pendhapa* kini digunakan untuk kegiatan



Foto Udara Bale Mangu
sumber: Dinas Kebudayaan DIY, tahun 2019



Bale Mangu
Tampak Dari Sisi Utara
sumber: Dinas Kebudayaan DIY,
tahun 2019

Tabel Perubahan Fungsi Bangunan di Kompleks Kepatihan
sumber: Septian Dhanu Anggoro, dirangkum dari Situs web Jogjacagar, <https://jogjacagar.jogjaprov.go.id/detail/1829/ndalem-kepatihan>.

No	Nama Bangunan	Fungsi Awal	Fungsi Saat Ini	Detail Perubahan
1.	Bale Mangu	Pengadilan Agraria & Tempat Tunggu	Ruang Pamer Kerajinan (Dekranasda)	Berubah dari bangsal terbuka menjadi gedung berinding (1950).
2.	Masjid Sulthoni	Tempat Ibadah Kepatihan	Masjid Kantor Gubernur DIY	Tetap terjaga; penambahan kanopi selasar dilakukan tahun 2013.
3.	Gedhong Wilis	Kamar Tamu Kerabat Patih	Ruang Kerja Gubernur DIY	Transformasi dari tempat menginap tamu menjadi pusat komando pimpinan tertinggi DIY.
4.	nDalem Ageng	Kediaman Resmi Papatih Dalem	Ruang Rapat & Penyimpanan Benda Budaya	Tetap mempertahankan <i>pasren</i> sebagai penghormatan terhadap tradisi.



Inskripsi angka tahun 1848
pada gable selasar Masjid Sulthoni
sumber: Dinas Kebudayaan DIY, tahun 2019

Namun demikian, kondisi ini juga menghadirkan tantangan tersendiri. Kebutuhan akan fasilitas modern, keamanan, dan efisiensi kerja sering kali berpotensi berbenturan dengan prinsip pelestarian yang menekankan keaslian material dan struktur. Oleh karena itu, pengelolaan Kepatihan memerlukan pendekatan yang cermat dan berimbang, agar nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya tetap terjaga tanpa menghambat fungsi administratif yang berlangsung.

Status dan Pengelolaan Pelestarian

Sebagai aset budaya dengan nilai historis tinggi, Kompleks Kepatihan telah ditetapkan sebagai cagar budaya melalui Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/PW.007/MKP/2010. Status ini diperkuat melalui Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57/KEP/2020.

Pengelolaan Kepatihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY dengan tetap mempertimbangkan aspek kepemilikan dan nilai tradisional yang melekat pada Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sebagian ruang dalam kompleks ini secara terbatas dibuka untuk kegiatan budaya dan kunjungan resmi, meskipun secara umum tidak difungsikan sebagai ruang publik seperti museum.

Pendekatan pengelolaan ini menunjukkan bahwa pelestarian tidak selalu identik dengan musealisasi. Berbeda dengan banyak bangunan

resmi pemerintahan, sementara ndalem ageng difungsikan sebagai ruang kerja gubernur. Transformasi ini menunjukkan bahwa adaptasi tidak selalu harus berarti perubahan fungsi, melainkan dapat berupa reinterpretasi fungsi dalam kerangka yang baru.

Dalam kerangka teori pelestarian, fenomena ini juga dapat dikaitkan dengan gagasan Alois Riegl tentang nilai guna (*use value*), yaitu ketika sebuah bangunan tetap dipertahankan bukan hanya karena nilai sejarahnya (*historical value*), tetapi juga karena fungsinya yang masih relevan dalam sistem pemerintahan modern. Hal ini menjadikannya sebagai contoh ideal dari integrasi antara pelestarian dan pemanfaatan.



Gambar Bale Woro, Arsip DPAD
sumber: <https://arsip.jogjaprov.go.id/index.php/balai-woro-sekarang-kantor-humas-dan-protokol-nampak-dari-depan>
diakses 17 Maret 2026



Bale Woro
Sumber: Dokumentasi Penulis, tahun 2026

bersejarah yang mengalami musealisasi, yakni perubahan fungsi menjadi objek pameran yang cenderung membekukan praktik sosial (Huyssen, 2003), Kepatihan Yogyakarta justru mempertahankan fungsi administratifnya secara berkelanjutan. Kondisi ini menempatkan Kepatihan sebagai bentuk *living heritage* yang dinamis, di mana nilai guna tetap berjalan seiring dengan nilai sejarah (Riegl, 1982; Smith, 2006).

Namun demikian, keberlanjutan fungsi ini menuntut keseimbangan antara kebutuhan modern birokrasi dan prinsip pelestarian keaslian bangunan serta ruang historisnya.

Dalam konteks ini, pelestarian dilakukan melalui pemanfaatan berkelanjutan yang memungkinkan bangunan tetap hidup dalam dinamika sosial dan pemerintahan (Bandarin dan van Oers, 2012). Dengan demikian, Kepatihan tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga aktor aktif dalam perjalanan sejarah itu sendiri.

Kepatihan Yogyakarta menunjukkan bahwa warisan budaya tidak harus dipertahankan secara statis. Melalui keberlanjutan fungsi, adaptasi ruang, dan transformasi kelembagaan, Kepatihan justru memperlihatkan bahwa pelestarian dapat berlangsung secara dinamis yang melibatkan negosiasi antara masa lalu dan masa kini.

Dalam konteks yang lebih luas, pengalaman Kepatihan memberikan pelajaran penting bagi pengelolaan cagar budaya di Indonesia. Bahwa keberlanjutan tidak hanya bergantung pada perlindungan fisik, tetapi juga pada kemampuan untuk menjaga relevansi fungsi dan makna dalam kehidupan masyarakat modern. Dengan demikian, Kepatihan tidak hanya layak dipandang sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai model praktik pelestarian yang adaptif dan berkelanjutan.

Sumber bacaan:

Bandarin, Francesco, and van Oers, Ron. *The Historic Urban Landscape: Managing Heritage in an Urban Century*. Wiley-Blackwell, 2012.

Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Buku Profil Yogyakarta "City of Philosophy"*. Dinas Kebudayaan DIY, 2015.

Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. "Ndalem Kepatihan." *Jogja Cagar Budaya*, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020, <https://jogjacagar.jogjaprov.go.id/detail/1829/ndalem-kepatihan>. Accessed 27 Mar. 2026.

Dwiyanto, Djoko, Editor. *Ensiklopedi Kraton Yogyakarta*. Dinas Kebudayaan DIY, 2009.

"Gedung-Gedung Penting Pemerintah RI di Yogyakarta." *Arsip DPAD DIY*, <https://arsip.jogjaprov.go.id/index.php/gedung-gedung-penting-pemerintah-ri-di-yogyakarta>. Accessed 27 Mar. 2026.

Huyssen, Andreas. *Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory*. Stanford University Press, 2003.

IDN Times. "Kepatihan, Kediaman Patih yang Kini Jadi Kantor Gubernur Yogyakarta." *IDN Times Jogja*, <https://jogja.idntimes.com/news/jogja/kepatihan-kediaman-patih-yang-kini-jadi-kantor-gubernur-yogyakarta-00-yplq6-824y7m>. Accessed 27 Mar. 2026.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/PW.007/MKP/2010*. 2010.

Nas, Peter J. M. *The Indonesian Town Revisited*. LIT Verlag, 2007.

Partadiningrat. "Kompleks Kepatihan Wewangunan-Wewangunan ing Wewengkon Dalem Kepatihan Danurejan Ngayogyakarta." *Djaka Lodang*, no. 756, year XVI, 14 Mar. 1987.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2020*. 2020.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2020*. 2020.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2020*. 2020.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2020*. 2020.

"Renovasi Bangsal Kepatihan Pemprov DIY Sudah Selesai." *Republika Online*, 2012, <https://news.republika.co.id/berita/m7ywxm/renovasi-bangsai-kepatihan-pemprov-diy-sudah-selesai>. Accessed 27 Mar. 2026.

Riegl, Alois. *The Modern Cult of Monuments: Its Character and Its Origin*. Translated by Kurt W. Forster and Diane Ghirardo, Oppositions Books, 1982.

Smith, Laurajane. *Uses of Heritage*. Routledge, 2006.



Septian Dhanu Anggoro lahir di Palembang, 13 September 1994. Menyelesaikan pendidikan Arkeologi di Universitas Gadjah Mada (2012–2019) dan Magister Manajemen UGM (2021–2023). Sejak 2019 mendampingi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyusunan naskah kajian penetapan cagar budaya tingkat provinsi. Pengalaman lebih dari enam tahun dalam bidang pelestarian cagar budaya, meliputi survei, dokumentasi, perencanaan, dan penulisan ilmiah. Selain itu, terlibat sebagai konsultan, narasumber, dan pengamat di bidang arkeologi. Saat ini aktif dalam kegiatan praktik pelestarian berbasis kolaborasi lintas sektor dan masyarakat.



Fasad BLKK
(eks. nDalem
Ngadinengaran),
2026
sumber:
Dokumentasi
Penulis

Simfoni Ruang dan Sejarah: Merawat Ingatan Kota Menelusuri Labkes DIY dan Bapel Jamkesos

Oleh: Adistya Rizki Nursanti

Di tengah Kota Yogyakarta yang terus bergerak secara dinamis, terdapat ruang-ruang kerja yang diam-diam menyimpan lapisan sejarah (*historical layer*) yang panjang. Dua di antaranya adalah Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi (Labkes) DIY berada di kawasan Mantriijeron yang menempati eks nDalem Ngadinengaran serta Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkesos) yang berada di wilayah Jetis. Sekilas, keduanya tampak sebagai kantor pelayanan publik sebagaimana umumnya. Sekilas keduanya tampak sebagai kantor pelayanan publik biasa. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, keduanya merepresentasikan dua lanskap budaya berbeda yang membentuk



Pendopo eks. nDalem
Ngadinengaran, 2026
sumber: Dokumentasi
Penulis

wajah Yogyakarta: kawasan tradisional Jawa di sekitar Kraton dan kawasan perkembangan kota bercorak kolonial di bagian utara.

Melalui dua titik ini, Yogyakarta tampak bukan hanya sebagai kota budaya, tetapi juga ruang dialog antara tradisi lokal dan pengaruh modernitas Eropa pada masa itu. Di sinilah “simfoni” arsitektur Jawa dan kolonial dapat dirasakan kehadirannya.

Jejak Ndalem Ngadinengaran di Tengah Aktivitas Laboratorium

Kompleks Labkes DIY menempati eks nDalem Ngadinengaran, salah satu bangunan yang berada dalam lingkungan budaya Kraton yang kental dengan arsitektur tradisional Jawa. Kawasan ini sejak awal berkembang sebagai ruang hunian bangsawan, dengan pakem yang mengikuti langgam nDalem pangeran yang berkembang di Yogyakarta. Jejak arsitektur tradisional tersebut masih dapat dikenali hingga kini. Susunan ruang utama berupa pendhapa, pringgitan, dan dalem ageng masih menjadi inti bangunan. Meski di

sekelilingnya telah berdiri bangunan tambahan, struktur utama nDalem tetap menempati posisi sentral.

Pendapa di bagian depan menjadi wajah bangunan, menghadirkan kesan menerima. Di ruang inilah dulu interaksi sosial berlangsung tanpa dibatasi sekat. Di belakangnya terdapat pringgitan dan dalem ageng mengesankan ruang yang lebih intim, mencerminkan perjalanan ruang luar ke dalam peralihan dari publik menuju privat. Pada bagian belakang terdapat pawon sebagai ruang domestik. Keseluruhan komposisi ini menunjukkan bahwa arsitektur Jawa tidak hanya mengatur ruang, tetapi juga relasi sosial dan kehidupan manusia dengan lingkungan.

Ketika beralih fungsi menjadi laboratorium kesehatan, ruang-ruang tersebut mengalami penyesuaian. Adaptasi dilakukan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan kerja tanpa menghilangkan karakter utama bangunan. Sejak tahun 1970, penyesuaian awal dilakukan dengan memperluas bagian pawon di sisi belakang untuk mendukung aktivitas Akademi dan



Pamandangan dalem
ageng BLKK, 2026
sumber: Dokumentasi
Penulis



Pamandangan pendopo BLKK, 2026
sumber: Dokumentasi Penulis

Laboratorium Kesehatan. Intervensi ini menjadi titik awal perubahan dari fungsi hunian menuju fungsi institusional. Pada periode 1993–1995, pembangunan gedung di sisi timur dilakukan dengan pendekatan yang lebih sensitif terhadap konteks, menggantikan bangunan berbahan kaca dengan bentuk yang lebih selaras. Upaya adaptasi berlanjut pada tahun 1996 melalui renovasi pendapa dan dalem, Termasuk beberapa elemen penting seperti saka guru, dinding, plafon, hingga ketinggian dalem ageng.

Memasuki tahun 2005, pembangunan bangunan memanjang di sisi timur laut, seiring meningkatnya aktivitas dan kebutuhan fasilitas. Perubahan tidak hanya terjadi pada fisik bangunan, tetapi juga pada aspek kelembagaan. Setelah kebijakan otonomi daerah pada 2008, kawasan ini dikelola bersama antara Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah DIY. Dinamika kelembagaan tersebut turut memengaruhi arah pengembangan berikutnya, termasuk pembangunan ulang gedung Poltekkes pada 2020 serta Laboratorium Terpadu pada 2021 yang telah memperhatikan prinsip pelestarian.



bangunan utama
Bapel Jamkesos,
2026
sumber:
Dokumentasi
Penulis



bangunan sisi barat Bapel Jamkesos, 2026
sumber: Dokumentasi Penulis

Pengembangan masih berlanjut hingga 2023 dengan penambahan fasilitas di sisi barat laut.

Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa bangunan bersejarah tidak selalu harus dibekukan sebagai monumen. Pada 2024, kompleks eks nDalem Ngadinengaran ditetapkan sebagai Cagar Budaya tingkat Kota Yogyakarta. Penetapan tersebut menegaskan bahwa nilai penting bangunan tidak hanya terletak pada keaslian bentuk, tetapi juga pada kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri.

Bapel Jamkesos: Arsitektur Indis dalam Lanskap Jetis

Berbeda dengan Labkes DIY yang berakar pada tradisi arsitektur Jawa, Bapel Jamkesos di kawasan Jetis menghadirkan dinamika lanskap kota yang tumbuh dalam pengaruh kolonial.

Jetis merupakan bagian dari perluasan permukiman masyarakat Eropa di Yogyakarta pada awal abad ke-20. Perkembangan kawasan bergerak dari Loji Kecil, Bintaran, hingga mencapai Jetis dan Kotabaru. Sebagai kawasan hunian dan perkantoran modern pada masanya, Jetis tumbuh dengan dukungan sekolah, kantor, serta infrastruktur kota. Letaknya strategis yakni berdekatan dengan Tugu sebagai titik akhir dari koridor Sumbu Filosofi, menjadikannya sebagai salah satu simpul penting perkembangan Yogyakarta moder. Karakter kawasan ini kemudian terbentuk melalui dominasi arsitektur Indis, Sementara dari aspek sosial budaya, secara historis kawasan ini menjadi ruang pertemuan berbagai kelompok Masyarakat baik pribumi, Eropa, hingga komunitas Tionghoa.

Bangunan Bapel Jamkesos dapat dipahami sebagai bagian dari kesinambungan fungsi kawasan. Bangunan yang kini digunakan sebagai kantor pelayanan sosial tersebut merupakan salah satu contoh bagaimana bangunan di kawasan Jetis terus mengalami perubahan fungsi, dari yang semula bersifat hunian atau perkantoran kolonial menjadi ruang pelayanan publik. Secara arsitektural, masih dapat diamati bahwa bangunan ini tetap mempertahankan corak khas arsitektur Indis. Hal ini terlihat dari tapak bangunan yang relatif luas dengan halaman dan teras terbuka serta langit-langit tinggi yang mendukung sirkulasi udara alami. Adanya pintu dan jendela berukuran besar yang berbentuk krepyak, dilengkapi ventilasi atas (*bouvenlicht*), menunjukkan perhatian terhadap pencahayaan dan penghawaan tropis.

Keseluruhan elemen ini menegaskan bahwa dalam perkembangannya, arsitektur Indis tidak hanya dipandang sebagai langgam melainkan hasil akumulasi dari pengetahuan dalam upaya penyesuaian terhadap lingkungan. Dengan demikian, Bapel Jamkesos tidak berdiri sebagai bangunan tunggal, melainkan sebagai bagian dari narasi besar Kawasan Jetis, bahwa warisan budaya tidak hanya dilestarikan sebagai artefak masa lampau, melainkan dihidupkan kembali melalui fungsi-fungsi baru yang relevan. Di sinilah arsitektur tidak sekadar menjadi bentuk fisik, tetapi juga medium yang merekam perjalanan kota dari hunian kolonial, kawasan administratif, hingga ruang pelayanan publik yang terus bergerak mengikuti kebutuhan zaman.

Merangkai Ruang dalam Simfoni Yogyakarta

Ketika Labkes DIY dan Bapel Jamkesos dilihat dalam satu bingkai, tampak bahwa keduanya mewakili dua konteks sejarah berbeda. Labkes DIY berada dalam Kawasan Cagar Budaya Kraton dengan dominasi arsitektur Jawa, sementara Bapel Jamkesos hadir di kawasan Jetis yang kuat dengan jejak arsitektur Indis sebagai bagian dari

perkembangan kota kolonial.

Perbedaan ini tidak menciptakan jarak, justru menghadirkan harmoni. Seperti dalam sebuah simfoni, setiap bagian memiliki karakter sendiri, tetapi saling melengkapi. Yogyakarta menjadi ruang tempat berbagai lapisan sejarah dapat berdampingan tanpa saling meniadakan.

Keduanya juga menunjukkan bagaimana Bangunan Cagar Budaya dapat terus hidup melalui adaptasi fungsi. Labkes DIY tetap aktif melayani kebutuhan kesehatan masyarakat, sementara Bapel Jamkesos menjalankan fungsi pelayanan sosial. Hal ini menjadi bukti bahwa yang terpenting dalam upaya pelestarian adalah mempertahankan nilai penting, integritas dan autentisitas kawasan. Melalui pemanfaatan yang berkelanjutan, bangunan dapat tetap relevan dan memiliki peran dalam kehidupan masyarakat.

Harmoni yang Terus Hidup

Menengok ruang kerja di Labkes DIY dan Bapel Jamkesos memperlihatkan bahwa Yogyakarta tidak pernah dibentuk oleh satu lapisan sejarah tunggal, melainkan oleh pertemuan berbagai ruang, waktu, dan budaya yang terus berkelindan. Di kawasan Kraton, eks nDalem Ngadinegaran menunjukkan bagaimana arsitektur Jawa tetap bertahan melalui adaptasi fungsi yang hati-hati, sementara di Jetis, bangunan Bapel Jamkesos merekam dinamika kota kolonial melalui langgam Indis yang responsif terhadap iklim. Keduanya bukan sekadar bangunan yang masih berdiri, tetapi ruang yang terus bekerja, melayani, dan hidup bersama masyarakat. Di sinilah “simfoni” itu terasa, bukan sebagai kontras, melainkan sebagai harmoni yang melebur dalam ruang kota.

Sumber bacaan

Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 246 Tahun 2024 tentang Penetapan Gedung Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta (Eks nNDalem Ngadinegaran) sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota yang Dilindungi.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkesos). Jogja Cagar, <https://jogjacagar.jogjaprovo.go.id/detail/169/bapeljamkesos>. Diakses 2026.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi (Labkes DIY). <https://labkes.jogjaprovo.go.id/page/77be2994-fef0-465b-9345-1545d896584d>. Diakses 2026.

Putri, Deasy Larasati Nurrahmah dan Fajriyanto. “Perubahan Fungsi dan Penampilan Bangunan Heritage Studi Kasus: Jalan AM. Sangaji, Yogyakarta.” SAKAPARI (Seminar Karya & Pameran Arsitektur Indonesia) 2020 #Series 5.

Yunita, Fatma. “Kajian Nilai Penting Cagar Budaya pada Kawasan Jetis, Yogyakarta.” Skripsi. Universitas Gadjah Mada. 2016.



Adistya Rizki Nursanti adalah arsitek dengan latar belakang pendidikan tinggi Arsitektur (S1) Universitas Islam Indonesia dan Magister Teknik Arsitektur (S2) Universitas Gadjah Mada. Memiliki sertifikasi Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung dan Ahli Muda Cagar Budaya (TACB Kabupaten Magetan). Berpengalaman dalam perencanaan permukiman, pemetaan bangunan dan gedung, serta kajian dan pengelolaan cagar budaya, ia terlibat dalam berbagai proyek pemerintah di bidang perumahan, kawasan kumuh, museum, dan pelestarian warisan budaya, serta menjadi Tim Penyiap Naskah TACB di Kota Yogyakarta.



Tebeng berhias gabungan motif geometris dan bunga pada Gedhong Pracimosono kompleks Kepatihan
sumber : Dokumentasi Penulis

Tebeng: Ornamen Perlindungan dalam Harmoni Arsitektur Jawa

Oleh: B. Sumardiyanto

Pandangan Orang Jawa tentang Keselamatan

Menurut Magnis Suseno, keselamatan dalam pandangan hidup orang Jawa dicapai dengan menjaga keselarasan hubungan manusia dengan tiga unsur kehidupan: alam, sesama manusia, dan Tuhan. Terhadap alam, orang Jawa mengenal prinsip *Hamemayu Hayuning Bawana*, yaitu memelihara dan bahkan memperindah alam semesta. Dalam kehidupan bermasyarakat, dikenal prinsip *Manunggaling Kawula Gusti*, yang menekankan kesatuan visi antara pemimpin



Tebeng dengan motif flora terbuat dari besi pada pintu utama Bangsal Kepatihan Kantor Gubernur DIY
sumber : Dokumentasi Penulis

dan rakyat. Sementara itu, hubungan manusia dengan Tuhan tercermin dalam ajaran *Sangkan Paraning Dumadi*, yakni kesadaran bahwa hidup merupakan perjalanan yang berasal dari Sang Pencipta dan pada akhirnya akan kembali kepada-Nya.

Sebagai upaya memperoleh keselamatan hidup (dapat kembali pada sang *Sangkan Paraning Dumadi*), masyarakat Jawa menggelar ritual *selamatan* dalam berbagai peristiwa penting. Tradisi ini dilakukan dalam siklus kehidupan seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. *Selamatan* juga dilaksanakan saat akan memulai pekerjaan besar, seperti membangun rumah, menanam padi, atau memulai usaha lainnya. Melalui doa dan sajian simbolis, ritual ini menjadi wujud ikhtiar untuk menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, sesama, dan Tuhan.

Rumah dan Keselamatan

Bagi masyarakat Jawa, rumah memiliki makna sebagai upaya mencari keselamatan yang dilakukan dengan menjaga relasi harmonis dengan alam numinus. Dalam budaya Jawa, ruang luar rumah (*njaba*) dipandang sebagai wilayah

publik yang rentan terhadap energi negatif, roh jahat, dan pengaruh luar yang bersifat fisik seperti gangguan binatang buas maupun rampok. Oleh karena itu bagian dalam rumah (*njero*), harus memberikan perlindungan baik secara fisik maupun simbolis untuk keselamatan penghuni.

Rumah tradisional Jawa memiliki tata ruang yang berlapis, bergerak dari ruang publik menuju ruang privat. Susunan ini bukan hanya soal fungsi, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan terhadap privasi dan keselamatan keluarga. Lapisan ruang tersebut diwujudkan melalui pendopo, *pringgitan*, dan *dalem*. Pendopo merupakan ruang depan yang terbuka untuk menerima tamu atau kegiatan umum. *Pringgitan* berfungsi sebagai ruang peralihan, sedangkan *dalem* menjadi ruang inti keluarga yang lebih tertutup, privat, dan sakral. Perjalanan dari ruang luar menuju ruang dalam ini menegaskan adanya batas antara wilayah sosial dan wilayah keluarga.

Pendopo dan Pringgitan

Ruang luar seperti pendopo dan pelataran bersifat terbuka dan menerima (*peternakan*). Ruang ini menjadi tempat berlangsungnya



*Tebeng pada pintu samping
Bangsal Kepatihan
Kantor Gubernur DIY
sumber : Dokumentasi
Penulis*

interaksi sosial dengan masyarakat luar. Namun, dalam pandangan masyarakat Jawa, keterbukaan tersebut tetap perlu dijaga agar tidak membawa pengaruh buruk ke dalam rumah. Sebaliknya, ruang dalam (*petanen*) seperti *dalem* dan *senthong* dipandang lebih suci dan privat, sehingga berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi keluarga, baik secara fisik maupun spiritual.

Pendopo sebagai ruang paling depan digunakan untuk menerima tamu atau menggelar acara umum. Penempatannya membatasi akses langsung ke bagian dalam rumah, sehingga

interaksi sosial tetap dapat berlangsung tanpa mengganggu kehidupan keluarga. Sementara itu, pringgitan yang berada di tengah berfungsi sebagai ruang peralihan atau *buffer zone*. Menurut Budiwiyanto, pintu *gebyok* pada ruang ini dapat ditutup rapat untuk menjaga privasi, sedangkan *tebeng* di bagian atas tetap memungkinkan cahaya dan udara masuk tanpa membuka pandangan langsung ke ruang *dalem*.



*Tebeng bermotif anak panah pada
beberapa bangunan
di dalam kompleks Kepatihan
sumber : Dokumentasi Penulis*

Dalem dan Senthong

Bagian paling dalam rumah adalah *dalem*, yang menjadi pusat kehidupan keluarga. Di dalamnya terdapat tiga ruang utama yang disebut *senthong*. *Senthong kiwa* berada di sisi timur kerap dianggap keramat, *senthong tengah* merupakan ruang paling sakral yang sering digunakan untuk keperluan ritual dan persembahan untuk Dewi Sri, sedangkan *senthong tengen* biasanya dimanfaatkan untuk beristirahat atau menyimpan hasil panen.

Ruang-ruang ini umumnya tidak dapat diakses orang luar karena menyimpan privasi sekaligus nilai kesakralan keluarga. Bahkan area

seperti pakiwan ngarep atau kamar mandi depan juga memiliki fungsi simbolis sebagai tempat membersihkan diri sebelum memasuki ruang yang lebih dalam.

Pintu dan makna filosofisnya

Perpindahan dari zona luar menuju zona dalam dalam rumah tradisional Jawa dipertegas oleh keberadaan pintu sebagai penanda batas ruang. Dalam arsitektur tradisional Jawa, pintu dimaknai sebagai gerbang transisi yang menghubungkan dunia luar yang bersifat publik dan profan dengan ruang dalam yang lebih privat dan sakral. Keberadaan elemen ini

mencerminkan filosofi hidup masyarakat Jawa yang menekankan harmoni dan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan.

Pintu atau lawang dalam rumah tradisional Jawa umumnya dibuat relatif rendah dan dilengkapi balok kayu melintang di bagian bawah yang disebut *thundhak*. Bentuk ini membuat setiap orang yang masuk harus sedikit menunduk dan melangkah hati-hati, yang dimaknai sebagai simbol kerendahan hati, penghormatan kepada tuan rumah, serta kesadaran spiritual di hadapan Tuhan. Rancangan pintu ini mencerminkan prinsip *Hamemayu Hayuning Bawana* dan pemisahan profan-sakral, di mana pintu menjadi penghalang energi negatif sambil tetap mempertahankan fungsinya memfasilitasi silaturahmi.

Tebeng dalam Arsitektur Rumah Jawa

Dalam rumah tradisional Jawa, pintu dan jendela umumnya dibuat dari kayu solid untuk menjaga keamanan dan privasi penghuni. Namun, agar sirkulasi udara dan cahaya matahari tetap dapat masuk ke dalam ruang, di bagian atas pintu atau jendela dipasang bidang yang lebih terbuka yang disebut *tebeng*. Elemen ini biasanya berupa lubang ventilasi berpanel kayu yang disusun berderet dan sering dihiasi ukiran bermotif tumbuhan merambat (*lung-lungan*), bunga ceplok, motif geometris, atau ornamen simbolis lainnya. Dalam perkembangannya, *tebeng* juga dibuat dari besi tuang atau pelat besi yang dirangkai.

Secara praktis, *tebeng* berfungsi sebagai ventilasi alami yang memungkinkan udara dan cahaya masuk tanpa mengurangi keamanan maupun privasi penghuni. Dari sisi estetika, ragam ornamen pada *tebeng* memperkaya keindahan arsitektur rumah Jawa sekaligus menunjukkan keterampilan seni ukir kayu dan kerajinan besi. Sementara itu, secara simbolis, *tebeng* dipercaya memiliki fungsi perlindungan. Berbagai ornamen yang diterapkan diyakini dapat menangkal energi negatif, roh jahat,

sekaligus menghadirkan berkah dan kesuburan bagi keluarga.

Salah satu ornamen yang kerap dijumpai adalah *kemamang*, yaitu motif menyerupai wajah raksasa atau *banaspati* yang dipercaya berperan sebagai pelindung rumah. Ornamen ini dimaknai sebagai simbol penolak bala yang “menelan” atau menangkal pengaruh buruk yang hendak masuk melalui pintu. Selain itu, motif Mega Mendung juga cukup populer. Motif ini melambangkan awan pembawa hujan yang menjadi simbol kesuburan, perlindungan, dan kehidupan. Lengkung-lengkungnya yang beraturan juga dimaknai sebagai perlambang emosi manusia yang harus dijaga dan dikendalikan.

Dengan fungsi yang berlapis yaitu praktis, estetis, dan simbolis, *tebeng* tidak sekadar menjadi elemen ventilasi, tetapi juga mempertegas filosofi rumah tradisional Jawa sebagai ruang yang menjaga harmoni antara manusia, alam, dan dunia spiritual.

Elemen Estetis yang Mempertegas Fungsi Perlindungan

Rumah tradisional Jawa menunjukkan kuatnya fungsi perlindungan dalam setiap elemen arsitekturnya. Hal ini tampak pada tata ruang yang berlapis, dari ruang luar yang bersifat publik menuju ruang dalam yang lebih privat dan sakral, serta pada kehadiran elemen penghubung seperti pintu dan *tebeng*. Susunan ruang yang bertahap, ditambah pintu dan *tebeng* dengan ornamen simboliknya, tidak hanya berfungsi sebagai pembatas fisik, tetapi juga diyakini mampu menangkal pengaruh buruk dari luar. Semua itu mencerminkan filosofi masyarakat Jawa dalam menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia spiritual demi mencapai keselamatan hidup.

Penerapan pada Bangunan Perkantoran Modern

Pengadaptasian gaya arsitektur tradisional Jawa pada bangunan perkantoran modern, khususnya kantor pemerintahan, memberikan banyak manfaat, baik dari sisi pelestarian budaya maupun fungsi bangunan itu sendiri. Penerapan elemen-elemen tradisional seperti atap tipe joglo, tata ruang yang menyesuaikan iklim tropis, hingga ornamen ukir pada *tebeng*, tidak hanya memperkuat identitas lokal, tetapi juga mendukung efisiensi lingkungan melalui sirkulasi udara dan pencahayaan alami.

Selain itu, kehadiran unsur-unsur arsitektur tradisional pada bangunan modern menjadi wujud nyata pelestarian kearifan lokal di tengah arus modernisasi. Bangunan pemerintah seperti Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi contoh bagaimana warisan arsitektur Jawa tetap hidup dan relevan dalam konteks kekinian. Dengan memadukan nilai tradisi dan kebutuhan modern, bangunan semacam ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pelayanan publik, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan daerah serta representasi identitas budaya Yogyakarta.



Sumber bacaan

- Budiwiyanto, Joko. Bentuk dan Makna *Gebyog Émpér* Rumah Tradisional Jawa. Surakarta: Brikolase. Vol. 13. No.1. Juli, 2021
- Dakung, Sugiyarto. *Arsitektur Tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.1982.
- Kinari, Deanne Lintang. *Ornamen Rumah Adat Jawa Tengah*. Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. 2018.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, Jakarta: PT Gramedia, 1984.
- Sumardiyanto. *Persistensi Makna Zona Publik Dan Privat Pada Rumah Tradisional Masyarakat Jawa Di Desa Jagalan Dan Kelurahan Purbayan Kotagede Yogyakarta*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan. 2016

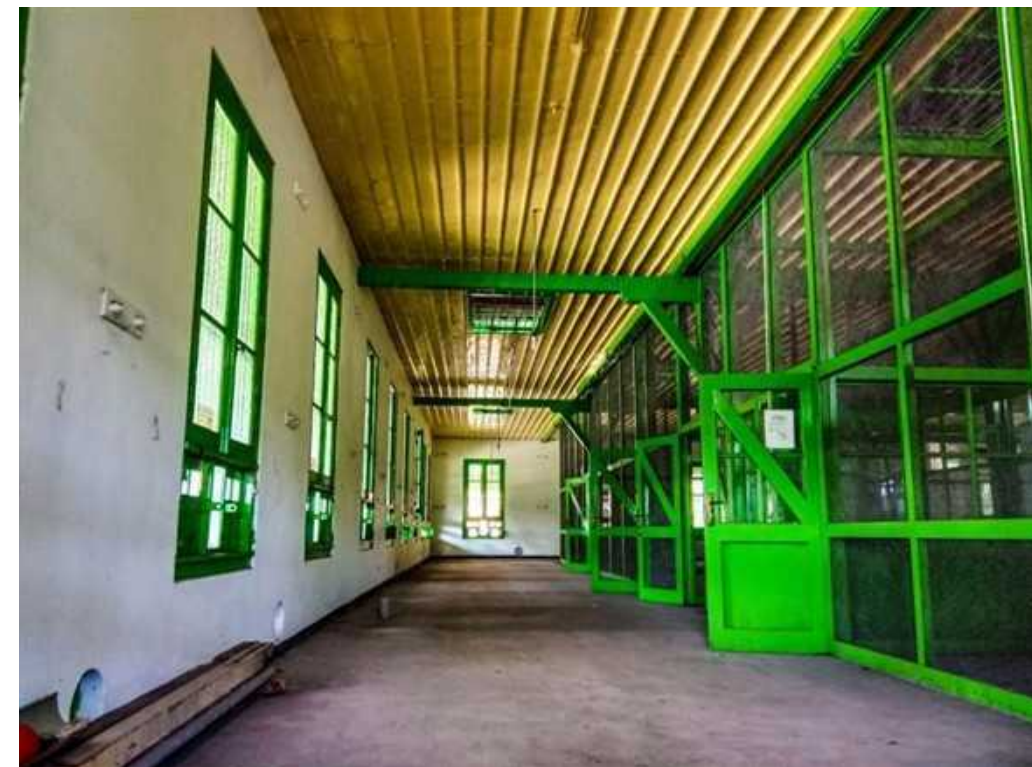
B. Sumardiyanto merupakan Staf Pengajar di Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, salah satu anggota TACB DIY, dan Ketua Dewan Warisan Budaya DIY



Suasana ruang kerja pegawai pegadaian
pada zaman dahulu
sumber: Gedenkschrift 25 Jarig
Gouvernements Pandhuisdienst, tahun 1926

Menilik Kantor Pegadaian Tempel: Saksi Bisu Perekonomian Rakyat

Oleh: Lengkong Sanggar Ginari



Bagian Dalam
Pegadaian Tempel
sumber: Dokumentasi
Penulis, tahun 2019

Sebagaimana masyarakat saat ini, masyarakat masa lalu juga telah mengenal praktik gadai, yakni menukar barang berharga dengan sejumlah uang dalam waktu singkat. Apabila barang berharga yang digadaikan gagal ditebus, maka barang tersebut akan dilelang. Pada awalnya, praktik ini belum dikelola oleh lembaga resmi. Masyarakat menggadaikan barangnya pada rumah gadai milik orang Tionghoa yang telah mendapatkan *pacht* atau konsesi dari pemerintah kolonial untuk menjalankan bisnis gadai. Sistem ini mulai diberlakukan di Hindia Belanda sejak 1871, akan tetapi di *Vorstenlanden* (wilayah yang mencakup Karesdienen Surakarta dan Yogyakarta) sistem tersebut baru diperkenalkan pada tahun 1872. Pendapatan yang diperoleh dari *pacht* gadai disetor ke kas kerajaan dan hanya berlaku pada rumah gadai milik orang Eropa atau Tionghoa. Sementara rumah gadai milik orang pribumi tidak perlu membayar *pacht* gadai. Akibatnya jumlah pegadaian pribumi yang dibuka melonjak drastis sampai akhirnya dikenakan pembatasan pendirian rumah gadai pada tahun 1891 (Anonim, 1926: 26-29).

Dalam perkembangannya, sistem *pacht* menunjukkan berbagai kegagalan. Banyak pemilik rumah gadai memeras nasabahnya dengan suku bunga yang tinggi. Selain itu, ketentuan tarif yang tidak jelas, praktik penjualan opium, hingga penampungan barang curian turut mewarnai operasionalnya. Kondisi bangunan rumah gadai juga banyak yang tidak layak menyebabkan banyak barang gadai rusak saat disimpan. Kerugian yang dihasilkan dari sistem *pacht* menjadi pertimbangan pemerintah kolonial untuk memonopoli usaha pegadaian di Yogyakarta berdasarkan *Gouvernementbesluit* No.46 29 Desember 1914 atau terpaut 13 tahun dari pegadaian pemerintah pertama yang dibuka di Sukabumi (Anonim, 1926: 30). Sejak itu, tidak ada pihak selain pemerintah yang diperkenankan membuka usaha gadai.

Berbeda dengan wilayah lain, di Yogyakarta pemerintah kolonial tetap harus membagikan sebagian keuntungan kepada Sultan. Sebelum monopoli diberlakukan, pada 1913 pemerintah kolonial telah merencanakan pembangunan sejumlah pegadaian di berbagai wilayah, seperti



Bagian Emper Pegadaian Tempel, Tempat Transaksi Gadai Dahulu Dilakukan
sumber: Dokumentasi Penulis, tahun 2019



Area Penyimpanan Barang-Barang Agunan
sumber: Dokumentasi Penulis, tahun 2019

Lempuyangan, Ngupasan, Sleman, Prambanan, Imogiri, Godean, Sentolo, Wates, Wonosari, Brosot, dan Gondomanan. Penganggaran dan proses pembangunan pegadaian tersebut dilakukan oleh *Burgerlijke Openbare Werken* yang bertanggungjawab dalam pembangunan gedung-gedung pemerintah (Anonim, 1917: 165).

Dari seluruh bangunan tersebut, pegadaian yang masih dapat memperlihatkan arsitektur bangunan pegadaian masa kolonial yang khas adalah bangunan Pegadaian Tempel. Secara umum, bangunan pegadaian terbagi menjadi tiga bagian, yakni rumah kepala pegadaian, kantor, dan gudang pegadaian (Romawati dan Prasetyo, 2015: 37). Ketiga bagian tersebut

selanjutnya disatukan menjadi satu massa bangunan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk kenyamanan dan keamanan kegiatan pegadaian. Sebagai contoh rumah kepala pegadaian dan gudang pegadaian dibuat bersebelahan dan terdapat pintu yang menghubungkan kamar kepala pegadaian dengan gudang untuk memudahkan penjagaan pada malam hari.

Setelah seluruh bangunan selesai, kegiatan pegadaian di Yogyakarta resmi dimonopoli pemerintah sejak 1 April 1915. Pada masa itu, transaksi gadai tidak dilakukan di dalam ruangan, melainkan di beranda melalui jendela loket yang jumlahnya cukup banyak untuk mengurangi antrean. Ukuran jendela juga dibuat tinggi supaya udara dan cahaya mudah masuk ke dalam ruangan. Bagian dalam pegadaian terbagi menjadi beberapa ruang, terutama ruang kerja pegawai yang dirancang tanpa sekat agar mudah diawasi oleh kepala pegadaian. Di sampingnya terdapat gudang penyimpanan barang jaminan yang dipisahkan dengan sekat kawat agar tetap dapat diawasi.

Barang-barang jaminan disimpan dan ditata berdasarkan jenisnya. Kala itu, barang yang umumnya digadaikan antara lain kain batik, benda-benda pusaka (seperti keris), perhiasan, benda dari kuningan dan perak, barang pecah belah, sepeda, hingga hewan ternak. Sementara itu, uang dan surat-surat berharga yang digadaikan nasabah disimpan di dalam brankas besi. Selain ruang kantor dan penyimpanan, tersedia pula ruang lelang bagi barang yang tidak ditebus. Kehadiran *Pandhuis* (rumah gadai) ini mendapat sambutan bagus dari masyarakat karena prosedurnya lebih sederhana, bunga yang rendah, dan memiliki senarai harga resmi sehingga para nasabah merasa lebih aman dalam bertransaksi (Febriani, 2007: 36)

Di balik keberhasilan bisnis gadai pemerintah kolonial, tersimpan pula kisah perlawanan para buruh pegadaian di Yogyakarta pada 1922. Aksi ini menjadi puncak protes terhadap ketidakadilan yang mereka alami.



Bagian Bangunan Kantor Pegadaian
sumber: Dokumentasi Penulis, tahun 2023



Bagian bangunan rumah beheeder
sumber: Dokumentasi Penulis, tahun 2023



Suasana transaksi gadai pada zaman dahulu.
 Lokasi tidak diketahui
 sumber: Gedenkschrift 25 Jarig Gouvernements
 Pandhuisdienst, tahun 1926



Suasana ruang penyimpanan
 sepeda yang digadaikan
 sumber : Gedenkschrift 25 Jarig
 Gouvernements Pandhuisdienst,
 tahun 1926

Kekecewaan bermula dari kebijakan pengurangan gaji sebagai bagian dari penghematan anggaran. Situasi memanas ketika seorang pegawai pribumi di Pegadaian Ngupasan dipecat setelah menyerang seorang pegawai Eropa. Peristiwa ini dipicu oleh penolakan sang pegawai pribumi untuk memindahkan barang lelang karena sedang sibuk dan menganggap pekerjaan tersebut dapat dilakukan sendiri oleh rekannya. Penolakan itu dibalas dengan ucapan yang merendahkan, hingga akhirnya berujung pada penyerangan terhadap pegawai Eropa yang mengakibatkan pemecatan kepada pegawai pribumi.

Pemecatan tersebut memicu solidaritas di kalangan pekerja. Perserikatan Pegawai Pandhuis Bumiputera (PPPB) kemudian mengorganisasi aksi mogok kerja di berbagai wilayah, seperti Lempuyangan, Bantul, Godean, Brosot, Sentolo, Gunungkidul, Sleman, dan Tempel. Aksi tersebut rupanya menyebar luas hingga kota-kota lainnya di luar Yogyakarta, meskipun pada akhirnya tidak membuahkan hasil sesuai harapan (*Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 14 Januari 1922).

Sumber bacaan

- Febriani, Dian Windu. *Perkembangan Tata Ruang Kompleks Pegadaian Kantor Cabang Lempuyangan Yogyakarta 1913–2006*. Skripsi. Universitas Gadjah Mada, 2007.
- Gedenkschrift Uitgegeven ter Gelegenheid van Het 25 Jarig Bestaan van Den Gouvernements Pandhuisdienst*. Weltevreden: Landsdrukkerij, 1926.
- Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 14 Januari 1922.
- Romawati, Sri Muryantini, dan Himawan Prasetyo. “Tinjauan Sejarah: Kantor Pegadaian Tempel.” *Buletin Narashima*. Yogyakarta: BPCB, 2015.
- Verslag over de Burgerlijke Openbare Werken 1913*. Weltevreden: N.V. Uitgever Mij. Papyrus, 1917.



Lengkong Sanggar Ginaris, lahir di Purworejo pada 6 November 1995, adalah arkeolog lulusan Magister Arkeologi Universitas Gadjah Mada (2021) yang berfokus pada pelestarian warisan budaya Indonesia. Sepanjang kariernya, ia aktif dalam berbagai penelitian, ekskavasi, dan pemugaran, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Lengkong pernah dipercaya sebagai Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Purworejo (2022–2024) serta Penyiap Cagar Budaya Kabupaten Sleman (2018–2024). Pengalaman profesionalnya mencakup keterlibatan sebagai tenaga ahli dalam proyek strategis, seperti pemugaran Pura Mangkunegaran, penelitian di Sawahlunto, hingga beautifikasi Stasiun Tugu. Selain aktif di lapangan, ia juga memberikan kontribusi pemikiran melalui tulisan ilmiah di jurnal arkeologi mengenai pemukiman kolonial dan isu pelestarian budaya.



Rumah milik Lurah Parangtritis Kapten Hadi Darsono digunakan sebagai rumah tinggal sekaligus Kantor Kelurahan Parangtritis, dan tempat singgah gerilya Jenderal Sudirman. Tanggal 20 Desember 1948, dengan ditandu menggunakan salah satu kursi dari rumah tersebut, Jenderal Sudirman meninggalkan Parangtritis menuju Panggang (sumber: TACB Kabupaten Bantul, 2024)

Jejak Bekas Kantor Lurah Merawat Memori Pemerintahan Desa di Yogyakarta

Oleh: Septi Indrawati Kusumaningsih

Desa sebagai Akar Tata Pemerintahan

Desa merupakan bentuk organisasi kekuasaan yang telah hadir jauh sebelum lahirnya kerajaan maupun negara modern. Desa tumbuh dan berkembang dalam kehidupan tradisional, dengan tata pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kebiasaan serta ketentuan adat yang berlaku secara lokal. Aturan-aturan tersebut lahir dari kesepakatan bersama dan menjadi pedoman penting dalam pengangkatan pemimpin, pengambilan keputusan, pembagian kewenangan, serta hak dan kewajiban warga.

Secara sosiologis, desa identik dengan masyarakat yang hidup sederhana, bersahaja, dan memiliki ikatan sosial yang kuat. Nilai-nilai adat diwariskan secara turun-temurun,



Rumah Tradisional milik Bapak M. Jinu Sugiyono di Padukuhan Karangtengah, Kalurahan Karangtengah, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul pernah dijadikan sebagai kantor pertama Kalurahan Karangtengah Imogiri sekaligus markas TNI pada masa Agresi Militer Belanda II tahun 1948. sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2021

sementara kehidupan sehari-hari bertumpu pada kemampuan memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya.

Seiring keterlibatannya dalam administrasi negara, desa tradisional kemudian bertransformasi menjadi bagian dari struktur pemerintahan Republik Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, pengaturan mengenai desa masih banyak dituangkan melalui maklumat yang dikeluarkan oleh Sri Sultan dan Sri Paku Alam, sebelum lahir Undang-Undang Pokok Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Meski demikian, pada masa itu belum terdapat peraturan yang secara khusus mengatur otonomi desa. Karena itu, dalam praktiknya bentuk dan susunan pemerintahan desa masih belum mengalami perubahan yang berarti.

Loyalitas Desa dalam Masa Perjuangan

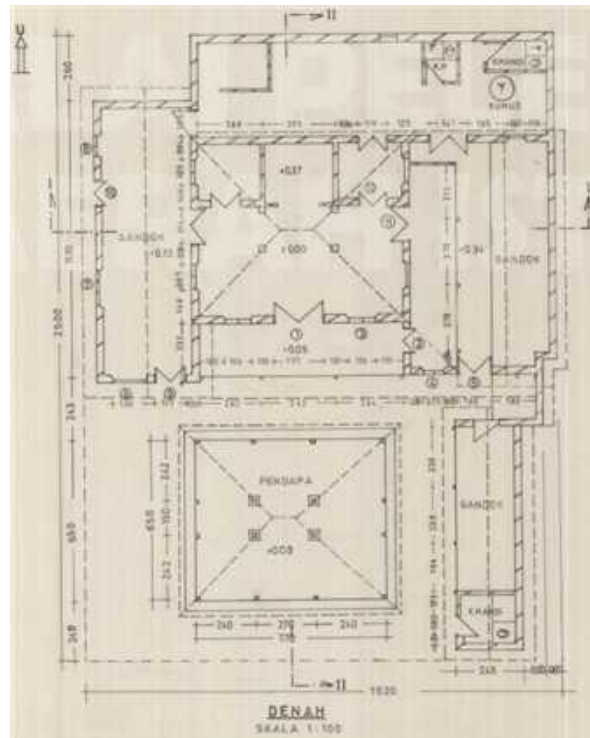
Satu hal yang tetap menonjol ialah kuatnya hubungan emosional masyarakat desa di wilayah Kasultanan Yogyakarta dengan Sultan. Pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, loyalitas lurah beserta warganya dibuktikan melalui keterlibatan langsung dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Mereka dengan sukarela menyediakan tempat berlindung, tenaga, serta dukungan logistik bagi para pejuang.

Saat Agresi Militer Belanda II pada 1948–1949, banyak lurah merelakan rumahnya menjadi markas TNI sekaligus tempat singgah Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam rute gerilya. Hasil panen masyarakat pun disumbangkan untuk mendukung dapur umum dan pasokan makanan para pejuang.

Hingga kini, desa masih dipandang sebagai subjek penting yang menjaga harmoni antara



*Rumah Tradisional milik Setyo Pranyoto di Pedukuhan Sungapan, Kelurahan Argodadi, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul menyediakan dapur umum bagi para pejuang yang mempertahankan jembatan Bantar di Sedayu melawan penjajah Belanda
sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2020*



*Contoh denah rumah tradisional Jawa yang terdiri atas bagian pendopo, pringgitan, dalem, longkangan, dan pawon
sumber: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta, 2010*

alam, manusia, dan tatanan spiritual keraton. Hubungan yang terpelihara tersebut menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta tetap memiliki akar budaya yang kuat hingga era modern.

Rumah Lurah sebagai Kantor Desa

Dilihat dari sejarah pembentukannya, desa secara alami memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengatur kehidupannya secara mandiri. Lurah atau kepala desa sebagai pemimpin umumnya dipilih dari warga yang dituakan atau dianggap memiliki kemampuan paling tinggi. Kondisi inilah yang membentuk desa-desa tradisional sebagai komunitas dengan ikatan genealogis serta kesatuan wilayah yang kuat.

Istilah lurah dan kepala desa sendiri memiliki riwayat penggunaan yang panjang, dengan makna dan fungsi yang mengalami pergeseran dari masa ke masa, terutama setelah berlakunya kebijakan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada masa lalu, lurah umumnya berasal dari kalangan bangsawan, tokoh berpengaruh, atau kelompok berada.



*Susunan balok tumpangsari dengan gimbal, dan penguncii emprit gantil
sumber : Dokumentasi Penulis*

*Rangkaian sokoguru dan tumpangsari sebagai penopang atap joglo
sumber : Dokumentasi Penulis*



*Detail dhadha peksi, balandar singup, dan plafond
sumber : Dokumentasi Penulis*

Mereka biasanya menempati rumah tradisional Jawa berbentuk joglo, limasan, atau kampung yang dibangun lengkap sesuai pakem arsitektur setempat.

Kondisi keterbatasan sarana pada masa lalu melatarbelakangi pemanfaatan rumah tinggal lurah sebagai kantor administrasi desa. Sejumlah rumah lurah yang masih berdiri kokoh hingga kini umumnya didirikan pada rentang 1900 hingga 1920-an, ketika perekonomian di wilayah Kasultanan Yogyakarta tengah mengalami kemajuan pesat. Perkembangan tersebut ditopang oleh pembangunan jaringan jalan, transportasi kereta api, serta aktifnya pabrik-pabrik gula di Jawa. Meski kemakmuran itu tidak dirasakan merata oleh penduduk

pribumi, para pemilik tanah dan kaum terpelajar mulai tumbuh sebagai kelas menengah baru yang mampu membangun rumah tinggal setara dengan hunian masyarakat Eropa pada masanya.

Tata Ruang, Kosmologi, dan Kehidupan Agraris

Rumah tinggal yang bernilai historis dan telah berstatus cagar budaya itu dibangun dengan pakem arsitektur Jawa. Kompleksnya luas, berpagar tembok tinggi, serta memiliki halaman depan dengan tanaman yang sarat makna simbolik dan manfaat. Tata ruang rumah tradisional Jawa mencerminkan kearifan lokal (*local genius*) yang menekankan harmoni antara alam dan manusia. Nilai tersebut tampak pada susunan bangunan, bentuk arsitektur, serta fungsi tiap ruang, yang umumnya terdiri atas pendhapa, pringgitan, dalem, longkangan, pawon, dan sumber air.

Rumah tradisional Jawa umumnya menggunakan kayu sebagai bahan utama dengan sistem sambungan knockdown, serta pasangan bata berperekat spesi bligon, teknik bangunan yang lazim pada masanya. Orientasi bangunan juga mempertahankan arah utara-selatan sebagai wujud kepercayaan kosmologi Jawa. Arah selatan menghadap Laut Selatan yang dikaitkan dengan Ratu Kidul, sehingga rumah tidak dianjurkan membelakanginya. Sementara arah utara menghadap Gunung Merapi yang dimaknai sebagai lambang kesuburan dan tempat bersemayamnya kekuatan leluhur.

Akses menuju kompleks rumah diawali melalui pintu gerbang yang disebut *seketheng*, yakni pembatas antara halaman depan dan bagian dalam rumah. Letaknya berada di sisi timur atau barat pendopo, berupa pintu kayu model *kupu tarung* dengan pengunci kayu sistem *slorogan*.

Di bagian paling depan berdiri pendopo, ruang publik yang digunakan untuk menerima tamu, musyawarah warga, resepsi pernikahan, pengajian, hingga kegiatan tradisi seperti *merti dusun* dan *suran*. Karena fungsinya yang terbuka

bagi masyarakat, pendhapa hampir selalu dijumpai di rumah lurah. Bentuknya umumnya berupa joglo terbuka tanpa dinding, meski ada pula yang menyatu dengan bangunan lain. Di sebelah utara pendopo terdapat *longkangan*, ruang terbuka penghubung, serta *pringgitan* berbentuk limasan. Ruang ini lazim dimanfaatkan untuk pertunjukan wayang, ketoprak, karawitan, pentas budaya, maupun latihan gamelan.

Lebih ke dalam terdapat ndalem, area privat bagi lurah dan keluarganya. Di dalamnya terdapat ruang keluarga serta tiga *senthong* berjajar: *senthong kiwa* (kiri) untuk menyimpan pusaka atau barang penting, *senthong tengah* atau *krobongan* yang disakralkan sebagai penghormatan kepada Dewi Sri, dan *senthong tengen* (kanan) yang umumnya digunakan sebagai ruang tidur.

Kehidupan desa bergantung pada sektor agraris, sehingga sebagian besar para Lurah bermatapencaharian sebagai petani. Mereka sangat memahami ilmu *pranata mangsa*, yakni penanggalan musim tradisional yang menjadi pedoman bercocok tanam dan menjaga keseimbangan alam. Setiap rumah tangga memiliki cara penyimpanan pangan untuk menghadapi masa paceklik atau menghindari kewajiban menyerahkan hasil bumi (*verplichte leveranties*) dan pajak dalam bentuk barang (*contingenten*) pada masa kolonial.

Salah satu tempat rahasia untuk menyimpan hasil panen berada di atas plafon bangunan joglo pada bagian ndalem. Di atas saka guru terdapat rangkaian balok yang terdiri atas *sunduk kili*, *pamidhangan*, serta susunan *balandar lar-laran* yang membentuk piramida terbalik dan disebut *tumpangsari*. Balok *tumpangsari* umumnya berjumlah ganjil, dan konon semakin banyak susunannya menandakan semakin tinggi strata sosial pemilik rumah. Di bagian dalam *tumpangsari* terdapat balok bertingkat yang disebut *balandar singup*, dengan balok pengunci berornamen ukiran di bagian tengah yang dinamakan *dhadha peksi*. Seluruh

struktur tersebut kemudian ditutupi plafon kayu, sementara ruang di atasnya dimanfaatkan sebagai tempat paling aman untuk menyembunyikan hasil panen agar tidak dirampas.

Di sisi pendhapa maupun ndalem biasanya terdapat *gandok*, bangunan memanjang tipe kampung yang terletak arah utara-selatan. Keberadaannya bisa di satu sisi atau lengkap di kanan dan kiri, yang dikenal sebagai *gandok kiwa* dan *gandok tengen*. *Gandok* bagian depan lazim dipakai sebagai kantor desa, sedangkan bagian belakang berfungsi sebagai ruang keluarga, tempat tidur anak, atau lumbung penyimpanan hasil panen.

Unsur vital lainnya adalah sumur sebagai sumber air. Sumur depan umumnya dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari maupun keperluan tradisi seperti pengambilan air suci saat *merti dusun*. Adapun sumur belakang, yang berada di area *pawon* atau dapur, digunakan untuk kebutuhan keluarga. Di beberapa tempat, sumur rumah lurah lama masih dipercaya memiliki khasiat tertentu bagi warga sekitar.

Sumber Bacaan

Ismijono. 1998. “Pemugaran Bangunan Kayu”. Makalah dalam Lokakarya Pengembangan Metode dan Teknik Konservasi Bangunan Kayu di Borobudur-Kudus, 2-11 November 1998. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Ismunandar, R. 2007. Joglo: Arsitektur Rumah Tradisional Jawa. Semarang: Dahara Prize.

Jogja Heritage Society. 2007. Pedoman Pelestarian Bagi Pemilik Rumah Kawasan Pusaka Kotagede, Yogyakarta, Indonesia. Jakarta: UNESCO Jakarta.

Josef Prijotomo. 2006. (Re-)Konstruksi Arsitektur Jawa, Griya Jawa dalam Tradisi Tanpa Tulisan. Surabaya: P.T. Wastu Lanas Grafika.

Maschab, Mashuri. 2013. Politik Pemerintahan Desa di Indonesia. Yogyakarta: PolGov UGM.

Poerwokoesoemo, Soedarisman. 1984. Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Sartono Kartodirdjo. 1999. Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Soemardjan, Selo. 1991. Perubahan Sosial di Yogyakarta. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.



Septi Indrawati Kusumaningsih, Lahir di Bantul, 18 September 1980. Bekerja sebagai Pamong Budaya Ahli Muda di Balai Pelestarian Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta sejak 2011. Tinggal di Plempoh RT 003 RW 014 Bokoharjo, Prambanan, Sleman.



Istana Westminster, Inggris diambil tahun 2022
 sumber: Photo by Terry Ott, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=122737498>

Merawat Kantor Pemerintahan Tua: Belajar dari Berbagai Negara

Oleh: Luthfi Alwi Muttaqin

Pendahuluan

Di tengah perkembangan sosial dan teknologi yang pesat, bangunan bersejarah yang telah berusia puluhan bahkan ratusan tahun menghadapi ancaman degradasi, baik secara fisik maupun pada nilai penting yang dikandungnya. Padahal, bangunan-bangunan ini tidak hanya menyimpan nilai sejarah dan arsitektur, tetapi juga merekam memori kolektif suatu bangsa. Dalam praktiknya, bangunan tersebut juga sering dihadapkan dengan tuntutan modern, terutama ketika masih difungsikan sebagai kantor pemerintahan. Kondisi ini memunculkan tantangan untuk menjembatani antara pelestarian dengan pengembangan sebagai kantor pemerintahan. Keterbatasan fisik bangunan lama

kerap berhadapan dengan tuntutan ruang dan fungsi yang terus berkembang dalam pelayanan publik.

Dalam konteks pelestarian, konsep adaptive reuse menjadi salah satu pendekatan penting untuk menjembatani kebutuhan tersebut. Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 mendefinisikan adaptasi sebagai upaya pengembangan cagar budaya agar sesuai dengan kebutuhan masa kini melalui perubahan terbatas, tanpa merusak nilai penting yang dikandungnya.

Pelestarian warisan budaya dengan melalui pendekatan *adaptive reuse* memungkinkan rehabilitasi bangunan dengan cara mempertahankan konstruksi, fasad, dan ornamen secara maksimal dalam penyesuaian dengan fungsi baru (Nuraimin & Trisno, 2020; Pintossi dkk, 2023; dalam Prastiwi, dkk, 2024). Konsep ini tidak hanya mengembalikan tampilan fisik arsitektur semata melainkan berusaha menghormati dan menghargai nilai sejarah dan langgam arsitekturnya dengan mengalihkan fungsi baru yang lebih tepat dan bermanfaat (Sofiana, dkk). Namun, penerapannya berbeda di setiap negara, tergantung pada kebijakan serta cara pandang terhadap warisan budaya. Berikut beberapa contoh dari berbagai negara dalam merawat bangunan pemerintahan bersejarah agar tetap berfungsi sekaligus relevan di masa kini.

Palace of Westminster (Inggris)

Palace of Westminster di London merupakan pusat legislatif pemerintahan Inggris yang awalnya berfungsi sebagai istana kerajaan sejak abad ke-11. Setelah mengalami kebakaran besar pada 1834, bangunan ini dibangun dan dirancang ulang dan dirancang ulang oleh Charles Barry dan Augustus Pugin. Proses pembangunan dimulai pada tahun 1840 dan selesai sekitar tahun 1876, meskipun masih mengalami penyempurnaan pembangunan hingga akhir abad ke-19.



*Istana Westminster, Inggris diambil tahun 1865
sumber: Photo by Otto Herschan/Getty Images <https://edition.cnn.com/2016/09/08/europe/houses-of-parliament-restoration>, tahun 1865*

Secara arsitektural, bangunan ini mengadopsi langgam *Perpendicular Gothic Revival*, sebagai reinterpretasi arsitektur Gotik Inggris abad pertengahan. Permukaannya dipenuhi ornamen ukiran dan detail geometris yang tidak hanya bersifat estetis, tetapi juga menyimbolkan identitas institusi pemerintahan.

Sebagai kantor pemerintahan, perubahan fisik bangunan dilakukan secara sangat terbatas untuk menjaga keasliannya. Penyesuaian lebih banyak dilakukan secara adaptif dan bertahap, terutama pada tata ruang, guna mendukung aktivitas legislatif seperti ruang sidang, ruang komite, dan area administratif, tanpa mengganggu nilai historis dan arsitekturalnya.

Reichstag Building (Jerman)

Reichstag Building merupakan bangunan parlemen Jerman yang terletak di Berlin dan berfungsi sebagai tempat sidang Bundestag pemerintahan Jerman. Bangunan ini awalnya dibangun pada akhir abad ke-19 dan selesai pada tahun 1894 berdasarkan rancangan Paul Wallot dengan langgam arsitektur *Neo-Renaissance*. Setelah Perang Dunia II, bangunan ini mengalami kerusakan lebih lanjut dan sempat tidak difungsikan secara optimal selama

periode pembagian Jerman Barat dan Jerman Timur. Setelah reunifikasi Jerman, bangunan ini direnovasi secara besar-besaran oleh Norman Foster pada tahun 1990-an, dan kembali difungsikan sebagai pusat parlemen pada tahun 1999.

Secara arsitektural, bangunan ini memadukan langgam *Neo-Renaissance* dengan intervensi modern. Fasad aslinya tetap dipertahankan dengan komposisi simetris, penggunaan kolom klasik, pedimen, serta ornamen relief. Elemen modern hadir melalui penambahan kubah kaca (*glass dome*) di atas ruang sidang utama. Struktur transparan ini memungkinkan pencahayaan alami sekaligus menjadi simbol demokrasi yang terbuka. Pengunjung dapat berjalan di *ramp spiral* dalam kubah dan melihat langsung ruang sidang di bawahnya, mencerminkan keterbukaan pemerintahan kepada masyarakat.

Sebagai bangunan pemerintahan, Reichstag Building menjadi contoh penerapan *adaptive reuse*, di mana pelestarian berjalan beriringan dengan inovasi. Integrasi elemen lama dan baru tidak hanya mempertahankan fungsi, tetapi juga memberi makna baru sebagai simbol negara demokrasi.



*Reichstag Building, diambil tahun 2021
sumber: photo by Gerrit Wilcke/pexels.com*



Fasad bangunan Reichstag Building



*Lukisan Gedung Reichstag dalam bentuk awal
(antara 1890 dan 1905).*

sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Gedung_Reichstag

West Block Parliament Hill (Kanada)

West Block di Parliament Hill, Ottawa, Kanada, merupakan bangunan legislatif yang dibangun pada 1859 sebagai gedung parlemen dan kantor departemen. Bangunan ini dirancang oleh Thomas Stent dan Augustus Laver dengan gaya *Victorian High Gothic Revival*, serta memiliki bentuk asimetris dengan tiga menara utama: Mackenzie, Laurier, dan Menara Barat Daya.

Setelah lebih dari satu abad, bangunan mengalami berbagai degradasi fisik. Upaya pelestarian dilakukan pada 2011–2018 dengan pendekatan *adaptive reuse*, termasuk perkuatan struktur secara modern di bagian dalam. Inovasi utama terlihat pada transformasi halaman tengah (*courtyard*) menjadi ruang sidang tertutup dengan atap kaca seluas 2.485 meter persegi, yang ditopang 20 kolom baja bercabang terinspirasi dari busur jendela *Gothic*. Adaptasi ini memungkinkan penambahan fungsi ruang tanpa mengubah karakter arsitektural bangunan.



Fasad bangunan West Block yang tidak mengalami banyak perubahan bentuk
sumber: Foto oleh Richard Seck, <https://www.ojdrovic.com/west-block>



Foto tampak atas yang memperlihatkan atap kaca pada bagian tengah bangunan
sumber: <https://www.canada.ca/en/public-services-procurement/services/infrastructure-buildings/parliamentary-precinct/projects-in-parliamentary-precinct/west-block-project.html>



Proses penambahan atap kaca sebagai atap Ruang Sidang
sumber: <https://www.ojdrovic.com/westblock>



Ruangan Sidang dokumentasi tahun 2018
sumber: <https://www.canada.ca/en/public-services-procurement/services/infrastructure-buildings/parliamentary-precinct/projects-in-parliamentary-precinct/west-block-project.html>



Adaptasi bangunan dari Courtyard/halaman menjadi Ruang Sidang
sumber: foto oleh Tom Arban, <https://www.canadianarchitect.com/raic-award-of-merit-for-innovation-in-architecture-west-block-rehabilitation-project/>

Seoul City Hall (Korea Selatan)

Seoul City Hall merupakan kompleks pemerintahan Kota Seoul yang mencerminkan hubungan antara bangunan bersejarah dan kebutuhan administrasi modern. Kompleks ini terdiri dari bangunan lama (*Old City Hall*) yang dibangun pada tahun 1926 pada masa pendudukan Jepang serta bangunan baru yang selesai pada tahun 2012 sebagai pusat administrasi utama. Bangunan pemerintahan ini cukup menarik terutama dalam penerapan *adaptive reuse* dalam satu kompleks bangunan bersejarah. Bangunan lama tetap dipertahankan dan dilestarikan tanpa ada penambahan bangunan maupun ruang yang ada, namun didirikan bangunan baru yang berada di belakang bangunan lama dengan mengusung konsep kontemporer dan modern.

Secara arsitektural, bangunan lama menampilkan langgam *Neo-Renaissance* dengan komposisi simetris dan elemen klasik yang mencerminkan karakter pemerintahan kolonial. Sebaliknya, bangunan baru menggunakan fasad kaca transparan dengan bentuk lengkung pada bagian depan, sebagai metafora dari *cheoma* (teritisan rumah tradisional Korea). Perancangnya, Yoo Kerl, menyebut atap ini



Seoul City Hall, bangunan lama dengan bangunan baru di belakangnya
sumber : Tristan Surtel , <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90068215>



Dokumentasi foto bangunan lama tahun 1945
sumber : Japanese book "Nostalgia for Korea"
published by Kokusho-kankoukai., <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3263606>

sebagai "langit-langit kota" yang memayungi alun-alun dan bangunan lama (Yoo, K., 2013).

Kontras visual antara kedua bangunan ini menghasilkan persepsi visual yang mencolok yang menimbulkan reinterpretasi baru tentang

nilai penting dari warisan budaya yang lama disandingkan dengan kemajuan teknologi dan arsitektural pada bangunan baru. Seoul City Hall menunjukkan bahwa pelestarian tidak hanya mempertahankan nilai penting, tetapi juga dapat memperkuat nilai penting tersebut melalui pendekatan yang modern dan inovatif.

Government House (Hong Kong)

Government House merupakan kediaman resmi kepala pemerintahan Hong Kong yang memiliki sejarah sejak masa kolonial Inggris pada pertengahan abad ke-19. Pada awalnya, bangunan ini berfungsi sebagai kediaman Gubernur Inggris dan tetap dipertahankan sebagai pusat kegiatan pemerintahan setelah penyerahan Hong Kong kepada Tiongkok pada tahun 1997. Secara arsitektural, bangunan ini menampilkan langgam kolonial dengan pengaruh *Neo-Classical*, yang



Foto Bangunan Government House tahun 2005
sumber: Michael Chan - Government House, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6133984>

kemudian mengalami berbagai modifikasi pada periode berbeda, termasuk penambahan elemen arsitektur pada masa pendudukan Jepang. Hal ini menjadikan bangunan tersebut memiliki karakter arsitektur berlapis (*layered architecture*) yang mencerminkan perubahan politik dan sejarahnya.

Dalam konteks adaptasi bangunan, pendekatan yang diterapkan adalah adaptasi berlapis lintas periode, di mana fungsi bangunan tetap digunakan sebagai kantor pemerintahan dengan berbagai intervensi yang dilakukan secara bertahap. Secara visual, tampilan utama bangunan relatif dipertahankan, namun berbagai penyesuaian dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan operasional modern tanpa menghilangkan jejak historis yang melekat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pelestarian bangunan dapat berlangsung secara akumulatif,

di mana identitas arsitektural terbentuk melalui penumpukan lapisan sejarah dari berbagai periode waktu.



Foto tahun 1868 oleh Floyd, William Pryor
sumber: <https://hpcbristol.net/visual/VH03-31>

Penutup

Pengelolaan bangunan cagar budaya sebagai kantor pemerintahan di berbagai negara menunjukkan bahwa pelestarian dan pemanfaatan dapat berjalan efektif melalui pendekatan yang kontekstual. Tidak terdapat satu model tunggal dalam penerapan adaptasi, karena strategi yang digunakan dipengaruhi oleh kondisi historis, kebijakan, dan kebutuhan fungsional masing-masing negara. Pendekatan tersebut bervariasi, mulai dari intervensi minimal seperti pada Palace of Westminster, integrasi kontras lama-baru seperti pada Reichstag Building dan Seoul City Hall, hingga adaptasi berlapis seperti Government House di Hong Kong.

Kunci pelestarian bangunan pemerintah bersejarah adalah menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fungsi dan perlindungan nilai penting. Adaptasi tidak sekadar memenuhi kebutuhan ruang dan teknologi modern, tetapi juga memperkuat makna simbolik serta identitas institusi pemerintah.



Luthfi Alwi Muttaqin, merupakan lulusan S1 Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada dan S2 Penginderaan Jauh Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada. Saat ini aktif sebagai konsultan Arkeologi dan Teknologi, dengan fokus kajian dan pemetaan Cagar Budaya.

Sumber bacaan:

Ferri, Luigi, and Safwan Al-Hasani. *Adaptive Reuse of Cultural Heritage: Methods and Case Studies*. Springer Nature, 2021.

Foster, Norman. *Reichstag: The Parliament in Berlin*. Prestel Publishing, 2000.

Ho, Pui P. *Government House: The Chief Executive's Official Residence*. Joint Publishing (H.K.) Co., Ltd., 2018.

Nuraimin, and R. Trisno. "Tinjauan Teori Adaptive Reuse dalam Pelestarian Bangunan Bersejarah." *Jurnal Arsitektur ZONASI*, vol. 3, no. 1, 2020, pp. 1–12.

Pearson, Christopher. *The Palace of Westminster*. G2 Entertainment, 2015.

Prastiwi, A., et al. "Strategi Adaptive Reuse pada Bangunan Bersejarah Guest House di Kota Malang." *Tata Kota dan Daerah*, vol. 17, no. 2, 2025, pp. 163–174.

Rahayu, T., and A. Syagita Elly. "Penerapan Metode Adaptive Reuse pada Bangunan Cagar Budaya Gedung Filateli Jakarta Pusat." *Jurnal Ilmiah Arjouna: Architecture and Environment Journal of Krisnadwipayana*, vol. 7, no. 2, 2023.

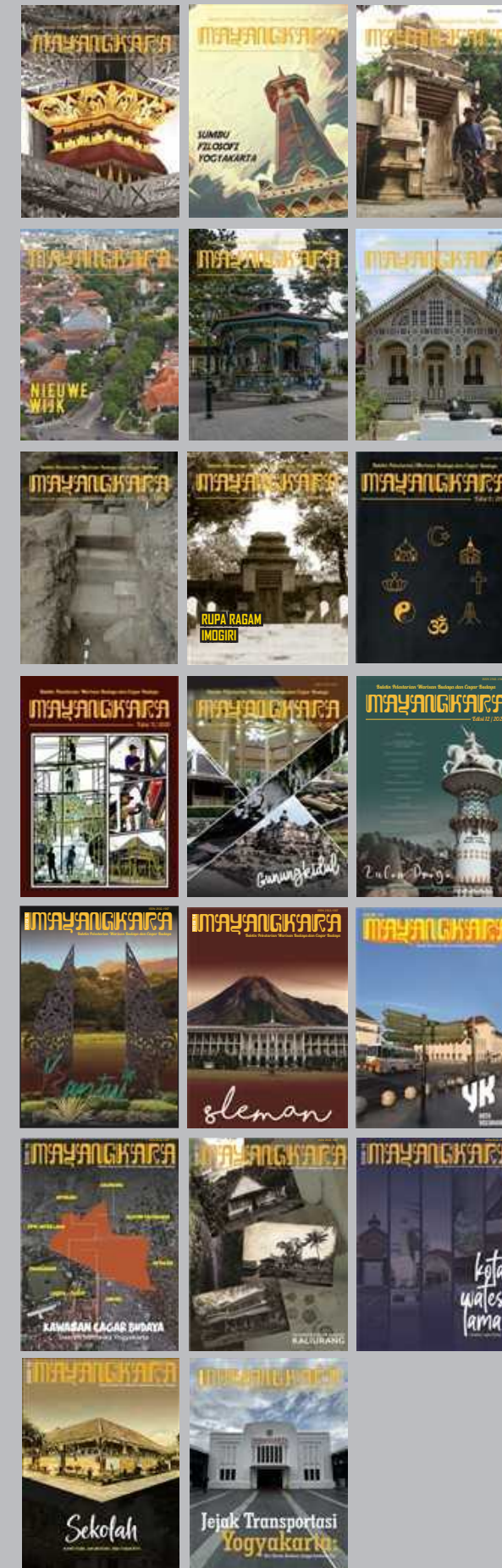
Sofiana, Retdia, et al. "Strategi Penerapan Konsep Adaptive Re-use pada Bangunan Tua: Studi Kasus Gedung PT P.P.I (Ex. Kantor PT Tjipta Niaga) di Kawasan Kota Tua Jakarta." *Seminar Nasional Sains dan Teknologi*, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, 12 Nov. 2014.

Yoo, Kerl. *New Seoul City Hall: The Birth of a New Civic Space*. iARC Publishing, 2013.

Yoo, Kerl. *Seoul City Hall: A New Architecture*. Architecture & Culture (ANC), 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Edisi Sebelumnya:



JOGJA Heritage TRACK



Info & reservasi

WA - 0895-1245-8744 / 0838-6996-8896

atau kunjungi

www.jogjaheritage.com



JOGJA Heritage CYCLING